

REKAM JEJAK CAGUB-CAWAGUB DKI JAKARTA 2017-2022



**REKAM JEJAK
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA
PERIODE 2017-2022
(Putaran Kedua)**



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
2017**

REKAM JEJAK CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR DKI JAKARTA PERIODE 2017-2022
(Putaran Kedua)

PENANGGUNG JAWAB:

Alghiffari Aqsa
Yunita

PENYUSUN:

Nelson Nikodemus Simamora
Muhammad Rizky Yudha Prawira

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

ISBN 978-602-17562-8-7
Jakarta, April 2017

Diterbitkan oleh:



Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3912377
email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
www.bantuanhukum.or.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR ISI

A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Teoritik.....	3
C. Indikator Rekam Jejak	5
D. Perolehan Suara Partai Pengusung	7
E. Profil dan Rekam Jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2017	8
1. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat	9
a. Keterlibatan dalam Suatu Kasus Hukum, Kode Etik atau Pelanggaran HAM	14
b. Pandangan dan Sikap terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas	15
c. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Pekerjaan.....	16
d. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Perumahan.....	16
e. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan.....	20
f. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Kesehatan.....	20
g. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Peradilan Yang Jujur dan Adil.	20
h. Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	20
i. Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi.....	21
j. Pandangan dan Sikap terhadap Lingkungan Hidup.....	22
k. Pandangan dan Sikap terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas	23
l. Pandangan dan Sikap terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu	23
m. Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Air	23
n. Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Rasa Aman	24
2. Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno	26
a. Keterlibatan dalam Suatu Kasus Hukum, Kode Etik atau Pelanggaran HAM	32
b. Pandangan dan Sikap Terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas	32
c. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan	33
d. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan.....	34
e. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan	35
f. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	36
g. Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Jujur dan Adil	36
h. Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	36
i. Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi.....	36
j. Pandangan dan sikap terhadap Lingkungan Hidup	37
k. Pandangan dan Sikap Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas	37
l. Pandangan dan Sikap Terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu	37
m. Pandangan dan Sikap Terhadap Hak atas Air.....	38
n. Pandangan dan Sikap Terhadap Hak atas Rasa Aman	38
F. Tabel Perbandingan Visi-misi dan Program Kerja	39
1. Visi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.....	39
2. Misi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur	39
3. Program Kerja Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur	40
a. Reformasi Birokrasi	40
b. Pendidikan	42
c. Kesehatan.....	43
d. Ekonomi.....	45
e. Penanggulangan Banjir.....	46
f. Tata Ruang Kota	48
g. Transportasi.....	50

h. Teknologi Informasi.....	51
i. Pariwisata dan Kebudayaan	52
j. Sosial.....	54
k. Lingkungan Hidup.....	55
G. Kesimpulan dan Rekomendasi	57
1. Kesimpulan.....	57
2. Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

A. LATAR BELAKANG

Setelah melalui proses lobi-lobi yang alot dan berakhir dengan kebuntuan, Jakarta akhirnya memiliki 3 (tiga) kandidat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur periode 2017-2022: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Selesai putaran pertama, Agus-Sylviana tersingkir hingga menyisakan Basuki-Djarot dan Anies-Sandiaga. Keduanya akan bersaing menjadi pemimpin Jakarta, menentukan bagaimana arah Jakarta 5 (lima) tahun ke depan, apakah akan menjadi lebih baik atau mundur ke belakang, terutama dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia memiliki makna penting dalam proses politik di Indonesia. Tidak hanya karena Jakarta selalu menjadi sorotan, apa yang terjadi di Jakarta dianggap sebagai peristiwa nasional dan dicontoh oleh daerah lain, tapi karena kontestasi politik di Jakarta telah terbukti mampu mengantarkan figur daerah menjadi presiden republik ini. Kontestasi Pemilu 2014 yang dilakukan oleh Joko Widodo dimulai saat ia menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, untuk kemudian menjadi Presiden menjadi buktinya.

Dampaknya yang kurang mengenakan, persaingan politik di daerah lain lain menjadi tidak begitu kelihatan karena begitu mendominasinya pemberitaan tentang Pilkada DKI Jakarta. Padahal, untuk tanggal 15 Februari 2017 yang lalu ada 101 (seratus satu) daerah lain yang mengadakan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau walikota secara serentak sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

Pilkada DKI Jakarta juga amat penting karena merupakan ujian bagi kematangan demokrasi: sejauh mana rakyat bisa meninggalkan sentimen primordial seperti agama dan ras. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, masalah ini belum begitu teruji. Namun, sepertinya kita harus menutup harapan itu rapat-rapat karena untuk Pilkada DKI Jakarta kali ini, sentimen sektarian dan politik identitas terjadi bertubi-tubi dengan cara-cara yang sangat brutal.

Ada ribuan berita palsu yang berisikan ujaran kebencian terhadap suatu ras tertentu, tuduhan PKI ala Orde Baru, termasuk para kandidat menggunakan sentimen tersebut untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Ada juga penghadangan kampanye salah satu calon yang sedang terbelit kasus hukum oleh orang-orang tertentu ketika sedang berkampanye di pelosok Jakarta. Kekhawatiran kami, hal inilah yang terlihat lebih menonjol dan akan dicontoh oleh daerah lainnya.

Akibat hal-hal negatif tersebut, perdebatan mengenai visi-misi, program kerja, dan bagaimana catatan terhadap para calon gubernur dan wakil gubernur selama ini menjadi terlewat. Kehadiran Debat Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sedikit memperbaiki hal tersebut namun tidak sepenuhnya. Untuk itulah Rekam Jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini disusun.

Pembuatan rekam jejak ini sendiri merupakan pertanggungjawaban LBH Jakarta sebagai lembaga yang senantiasa berpihak pada rakyat sekaligus merupakan kontribusi LBH Jakarta terhadap pendidikan dan kesadaran politik warga dan selalu dilakukan pasca pemilihan umum secara langsung diberlakukan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya informasi yang cukup bervariasi, dari debat kandidat, berita-berita obyektif yang beredar luas di masyarakat, dan rekam jejak ini,

masyarakat dapat memberikan suaranya ke calon yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Penyusun,

LBH Jakarta

B. KERANGKA TEORITIK

1. Pemilu

Pemilu adalah metode untuk memilih kandidat-kandidat yang ada untuk sebuah posisi atau jabatan tertentu. Pemilu menjadi satu-satunya metode yang dihormati secara penuh untuk memilih pemimpin politik dan gubernur di seluruh dunia. Bahkan suatu negara yang secara umum diketahui sebagai negara kediktatoran atau rezim militer akan seringkali menggunakan pemilu yang curang untuk menyembunyikan cara dalam pemilihan politik.¹

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pemilihan umum (Pemilu) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu, hak untuk ikut serta menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat bernegara. Begitu penting dan besarnya pengaruh pemerintah terhadap kehidupan rakyat sehari-hari memberikan justifikasi yang kuat bagi rakyat untuk memilih hak politik yaitu memilih dan mengontrol pemerintah.²

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dimaksud Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (atau disebut Pemilihan) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Gubernur dan Wakil Gubernur

Untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, seseorang harus memenuhi syarat-syarat:

Pasal 7³

(1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*

¹ David Robertson, *The Routledge Dictionary of Politics*, 3rd ed., (New York: Routledge, 2004), hal. 159-160.

² Aribowo, et. al., *Mendemokratiskan Pemilu*. (Jakarta: Elsam, 1996), Hal. X.

³ Butir pasal yang sudah dihapus tidak dimasukkan.

- d. *Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*
- e. *Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f. *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- g. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- h. *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i. *Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j. *Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k. *Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- l. *Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- m. *Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- n. *Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- o. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- p. *tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
- q. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- r. *menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

4. Rekam Jejak

Rekam Jejak atau Track Record adalah catatan kinerja di masa lampau yang digunakan sebagai indikator untuk menerka kinerja di masa depan.⁴ Rekam jejak bagi seorang pejabat publik atau politik sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana latar belakang, jejak atau kesan terhadap tingkah laku perbuatan yang bersangkutan pada masa yang lampau untuk

⁴ Track Record, <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/track%20record>>, diakses 23 Januari 2017.

dapat dilacak dan dikritisi. Adakah cacat hukum, moral dan sosial sehingga yang bersangkutan menjadi patut dan layak untuk dicalonkan menduduki sebuah jabatan publik.

C. INDIKATOR REKAM JEJAK

Indikator ini mengukur rekam jejak calon berdasarkan pendekatan hak yang lazim digunakan dalam penelitian hak asasi manusia.

INDIKATOR	CARA MENGUKUR
Keterlibatan dalam Suatu Kasus Hukum, Kode Etik atau Pelanggaran HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum 2. Diduga atau diisukan terlibat dalam pelanggaran etik 3. Diduga atau diisukan terlibat dalam pelanggaran HAM
Pandangan dan Sikap terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas	Sikap terhadap keberagaman dan masyarakat minoritas
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan dan sikap terhadap Jaminan hak-hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja 2. Jaminan kebebasan hak berserikat; 3. Tingkat pengangguran
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan	Pandangan dan sikap terhadap masalah penyediaan rumah yang layak bagi rakyat dan penggusuran paksa
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan	Pandangan dan sikap mengenai ketersediaan, keterjangkauan, kebersesuaian, keberterimaan, kualitas pendidikan
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandangan dan sikap terkait ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah yang sesuai bagi seluruh penduduk 2. Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya 3. Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan 4. Kesetaraan dalam layanan kesehatan
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Peradilan Yang Jujur dan Adil (<i>fair trial</i>)	Penyediaan bantuan hukum gratis untuk masyarakat
Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan atau diopinikan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme 2. Komitmen dan gagasan pemberantasan korupsi 3. Komitmen dan gagasan pencegahan korupsi
Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi	Sikap dan pandangan terkait kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Pandangan dan Sikap terhadap Hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan atau diopinikan melakukan

	<ul style="list-style-type: none"> perusakan lingkungan 2. Komitmen dan gagasan pelestarian lingkungan hidup
Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi	Sikap dan pandangan terkait kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
Pandangan dan Sikap terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sikap dan pandangan terhadap para penyandang disabilitas 2. Sikap dan pandangan terhadap hak-hak para penyandang disabilitas
Pandangan dan Sikap terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sikap dan pandangan terhadap penegakan hukum 2. Sikap dan pandangan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu
Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Air	Sikap dan pandangan terhadap hak atas air
Hak atas Rasa Aman	Sikap dan pandangan terkait keamanan di Jakarta

D. PEROLEHAN SUARA PARTAI PENGUSUNG

Berikut perolehan suara⁵ dan kursi 10 partai politik untuk DPRD DKI Jakarta beserta pencalonan masing-masing Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 (Putaran Kedua):⁶

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
PDIP: 1.231.843 suara (28 kursi) Golkar: 376.221 suara (9 kursi) Hanura: 357.006 suara (10 kursi) NasDem: 206.117 suara (5 kursi)	Gerindra: 592.568 suara (15 kursi) PKS: 424.400 suara (11 kursi)
42 kursi	26 kursi

⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan total kursi di DPRD DKI Jakarta, maka batas minimal kursi untuk mencalonkan pasangan calon adalah 21 (dua puluh satu) kursi.

⁶ Ini Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD DKI, <<http://news.detik.com/berita/2581416/ini-perolehan-kursi-partai-politik-di-dprd-dki>>, diakses 23 Januari 2017.

E. PROFIL DAN REKAM JEJAK CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA



(verbumnews.com)

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT

DATA-DATA CALON GUBERNUR DKI JAKARTA

DATA PRIBADI

Nama lengkap : Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M.
Tempat, tanggal lahir : Manggar, 29 Juni 1966
NIK : 3172012906660005
Usia : 50 Tahun
Alamat : Pantai Mutiara Blok J No. 39, RT. 006/RW. 016, Pluit
Penjaringan, Jakarta Utara
E-mail : ahokbtp@gmail.com
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Kawin
Agama : Kristen
NPWP : 06.520.857.1-305.000
Hobi : Olahraga
Motto hidup : Mati adalah keuntungan dan hidup untuk wujudkan keadilan sosial
Harta kekayaan : Rp. 25.655.887.496,- dan USD 7.228,-

PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
Magister	Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Prasetia Mulya	1994
Sarjana	Teknik Geologi, Universitas Trisakti	1990
Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK) PSKD III, Jakarta	1981-1984
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri I, Gantung, Belitung Timur	1978-1981
Sekolah Dasar	SD Negeri 03, Gantung, Belitung Timur	1971-1977

PENDIDIKAN INFORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
-	-	-

PENGALAMAN PEKERJAAN

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Direktur Eksekutif	Center for Democracy and Transparency (CDT 3.1)	2007-2009
Direktur	PT. Nurindra Ekapersada	1992-2005
Staf Direksi Bidang Analisa Biaya & Keuangan	PT. Simaxindo Primadaya	1994-1995
Anggota	DPRD Kabupaten Belitung Timur	2004-2005
Bupati	Kabupaten Belitung Timur	2005-2006

Anggota	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia	2009-2012
Wakil Gubernur	Provinsi DKI Jakarta	2012-19 November 2014
Gubernur	Provinsi DKI Jakarta	19 November 2014- Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Sekretaris Jenderal	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	2007

PUBLIKASI

JUDUL	INSTITUSI/FORUM	TAHUN
Majalah Merubah Indonesia	-	2008

PENGHARGAAN

JUDUL	INSTITUSI	TAHUN
10 Tokoh yang Mengubah Indonesia	Majalah TEMPO	2006
PIN Emas	Forum Demokrasi (Fordeka)	2006
Tokoh Anti Korupsi	Koalisi Kebersamaan Tiga Pilar Kemitraan	2007
Tokoh Anti Korupsi 2013	Bung Hatta Anti Corruption Award	2013
Tokoh Kontroversial	Anugerah Seputar Indonesia (ASI)	2013

DATA KELUARGA

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri	Veronica Tan	Ibu Rumah Tangga
Anak	Nicholas Sean	Mahasiswa
Anak	Nathania Berniece Zhong	Pelajar
Anak	Daud Albenner Purnama	Pelajar

DATA-DATA CALON WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA

DATA PRIBADI

Nama lengkap : Drs. Djarot Syaiful Hidayat, M.S.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Juli 1962
NIK : 0357203060762002
Usia : 54 Tahun
Alamat : Jalan Mega Kuningan Barat III Blok E35 No. 11, RT. 004/RW.005
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
E-mail : wagubdjarot@gmail.com
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Kawin
Agama : Islam
NPWP : 09.768.563.0-653.000
Hobi : Membaca, berolahraga, berorganisasi
Motto hidup : Isi hidupmu dengan mengabdikan kepada sesama, bangsa, dan negara
Harta kekayaan : Rp. 6.295.603.364,-

PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
Magister	Universitas Gadjah Mada	1991
Sarjana	Universitas Brawijaya	1986
Sekolah Menengah Atas	SMA TNH Mojokerto	1977-1981
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 4 Surabaya	1974-1977
Sekolah Dasar	SD Raden Saleh Surabaya	1968-1974

PENDIDIKAN INFORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
-	-	-

PENGALAMAN PEKERJAAN

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Wakil Gubernur	Provinsi DKI Jakarta	17 Desember 2014-Sekarang
Ketua	Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan	2015-Sekarang
Anggota	DPR RI Fraksi PDI Perjuangan	1 Oktober 2014-12 Desember 2014
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	DPD PDI Perjuangan Jawa Timur	2005-2010
Walikota	Kota Blitar	3 Mei 2000-3 Agustus 2010
Deputi I Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Jawa Timur	2001

Ketua Komisi A	DPRD Provinsi Jawa Timur	1999-2000
Anggota	DPRD Jawa Timur	1999-2000
Pembantu Rektor I	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	1997-1999
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	1991-1997
Pembantu Dekan I	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	1989-1991
Dosen	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	1986

PENGALAMAN ORGANISASI

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Ketua Bidang Organisasi	DPP PDI Perjuangan	2010-2015
Ketua	Pengurus Alumni (PA) GMNI Jawa Timur	2010-2015
Ketua	Apeksi	2005-2010
Ketua	Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Brawijaya	1981-1986
Ketua I	Pappuda PDI Perjuangan Jawa Timur	1999

PUBLIKASI

JUDUL	INSTITUSI/FORUM	TAHUN
-	-	-

PENGHARGAAN

JUDUL	INSTITUSI	TAHUN
Penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	2008
Penghargaan Terbaik Citizen's Charter Bidang Kesehatan, Anugerah Adipura	-	2006, 2007, 2008
Anugerah Adipura	Departemen Lingkungan Hidup	2006, 2007, dan 2008
Penghargaan atas Terobosan Inovasi Daerah se-Provinsi Jawa Timur di dalam Pembangunan Daerahnya	-	2008
Penghargaan Upakarti	Presiden Republik Indonesia	2007
Peringkat Pertama dalam Penerapan e-Government di Jawa Timur	-	2010

DATA KELUARGA

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri	Happy Farida	Ibu Rumah Tangga
Anak	Safira Prameswari	Pelajar
Anak	Karunia Dwi Hapsa	Pelajar
Anak	Meisya Rizky Berliana	Pelajar

REKAM JEJAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT

Keterlibatan dalam Suatu Kasus Hukum, Kode Etik atau Pelanggaran HAM



Basuki Tjahaja Purnama saat berpidato di Pulau Pramuka, 17 September 2016 (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Hingga rekam jejak ini selesai dibuat, Basuki Tjahaja Purnama masih menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya saat berada di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. LBH Jakarta menolak proses hukum terhadap Basuki dengan pasal penistaan agama karena rumusan pasal tersebut bermasalah dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang berasal dari kalangan agama minoritas. LBH Jakarta sebelumnya merupakan kuasa hukum para pemohon dalam *Judicial Review* UU PNPS 1 Tahun 1965 pada tahun 2009 silam yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal penistaan agama bertentangan dengan UUD 1945.⁷



Suasana sidang Class Action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (okezone.com/Reni Lestari)

⁷ *Tajuk Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/tajuk-advokasi-lembaga-bantuan-hukum-jakarta/>>, diakses 25 Januari 2017.

Dalam kasus pengusuran warga Bukit Duri, Basuki tidak menghiraukan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal para hakim yang mengadili kasus Class Action tersebut sudah menghimbau kepada Gubernur DKI Jakarta (Basuki) untuk tidak unjuk kuasa dengan mengusur warga Bukit Duri ketika proses hukum sedang berjalan. Namun hal ini tidak dihiraukan.

Pandangan dan Sikap terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas



Suasana penentangan keberadaan masjid Ahmadiyah di Bukit Duri.

Tentang keberagaman dan kelompok minoritas, Basuki melindungi hak umat Ahmadiyah untuk terus beribadah ketika masjid Ahmadiyah di Bukit Duri didatangi oleh puluhan orang yang mengusir mereka agar tidak beribadah di situ. Dengan berani Basuki menyatakan bahwa "*Soal perselisihan sesat atau nggak itu sesuatu yang berbeda. Kita negara nggak ikut campur mengurus itu, secara konstitusi tidak mengurus itu*"⁸⁹ Meskipun rumah yang dijadikan masjid disegel oleh Dinas Tata Kota, Basuki masih memperbolehkan umat Ahmadiyah untuk bersembahyang di situ.

Catatan sedikit tentang sikap Basuki, ia seringkali dalam berbagai kesempatan mempermasalahkan sendiri keberadaannya sebagai etnis minoritas dan berasal dari agama minoritas pula. Padahal tidak terjadi apa-apa dan hal tersebut tidak perlu dipersoalkan oleh dirinya sendiri.¹⁰ Dalam hal *Lesbian, Gay, Biseksual*, dan *Transgender* (LGBT), Basuki menyatakan bahwa LGBT dilarang oleh agama manapun namun tidak bisa menghakimi. Basuki berpendapat bahwa yang penting adalah bagaimana agar tidak

⁸ *Kasus Bukit Duri, Hakim Imbau Pemda DKI Tak Main Kekuasaan*, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/09/06/083802046/kasus-bukit-duri-hakim-imbau-pemda-dki-tak-main-kekuasaan>>, diakses 14 Januari 2017.

⁹ *Ahok Persilakan Jemaah Ahmadiyah Beribadah di Tebet*, <<https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-persilakan-jemaah-ahmadiyah-beribadah-di-tebet.html>>, diakses 1 Januari 2017. Lihat juga *Soal Jemaat Ahmadiyah Disegel, Ahok: Kita Izinkan Ubah Peruntukan*, <<http://news.detik.com/berita/2969868/soal-rumah-jemaat-ahmadiyah-disegel-ahok-kita-izinkan-ubah-peruntukkan>>, diakses 1 Januari 2017.

¹⁰ *Ahok: Kelemahan Saya Sudah Cina, Kafir Pula*, <<https://m.tempo.co/read/news/2014/12/14/231628483/ahok-kelemahan-saya-sudah-cina-kafir-pula>>, diakses 1 Januari 2017.

ada penularan HIV/AIDS.¹¹ Basuki-Djarot malah didukung oleh kelompok transgender yang berpendapat dalam masa kepemimpinan Basuki-Djarot ada perhatian terhadap hak-hak transgender.¹²

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

Dalam berbagai kesempatan, Basuki-Djarot sudah sering sekali menggusur pedagang kaki lima. Dalam masa pemerintahannya LBH Jakarta sering menerima pengaduan dari pedagang kaki lima bahwa untuk berjualan mencari makan secara halal saja sangat sulit. Dalam kasus yang khusus misalnya, Basuki-Djarot memindahkan pedagang kaki lima ke di Kota Tua ke tempat lain. Tujuannya adalah untuk mempercantik kawasan Kota Tua, namun yang terjadi adalah pasca relokasi tersebut dagangan mereka tidak laku karena daerah tujuan relokasi bukan daerah wisata.¹³ Dalam hal penggusuran juga Basuki mempersulit hak atas pekerjaan warga korban gusuran yang tadinya dekat dengan lokasi kerja menjadi sangat jauh.

Kenaikan upah buruh, pada awal ketika masih berduet dengan Joko Widodo awalnya memberikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang cukup tinggi untuk menyesuainya dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi semenjak Basuki menjadi gubernur kenaikannya tidak signifikan dan tidak sesuai dengan KHL.¹⁴ Tidak ada juga Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di DKI Jakarta.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Perumahan



Suasana Pasca Penggusuran Kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara (berdikarionline.com)

¹¹ *Ini Komentar Ahok Melihat Fenomena LGBT*, <<http://news.liputan6.com/read/2421401/ini-komentar-ahok-melihat-fenomena-lgbt>>, diakses 1 Januari 2017.

¹² *Komunitas Waria Jakarta Dukung Ahok-Djarot*, <<http://www.tigapilarnews.com/berita/2016/12/21/88144-komunitas-waria-jakarta-dukung-ahok-djarot>>, diakses 1 Januari 2017.

¹³ *PKL Kota Tua Keluhkan Sepi Pembeli Usai Relokasi*, <<http://www.beritasatu.tv/news/pkl-kota-tua-keluhkan-sepi-pembeli-usai-relokasi/>>, diakses 4 Januari 2017.

¹⁴ *Buruh Jakarta Desak Ahok Tetapkan UMP 2017 Pakai Survei KHL*, <<http://www.suara.com/bisnis/2016/10/10/205017/buruh-jakarta-desak-ahok-tetapkan-ump-2017-pakai-survey-khl>>, diakses 5 Januari 2017.

Sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan Basuki menjadi masa pemerintahan yang paling tinggi kasus penggusurannya. Berdasarkan laporan LBH Jakarta, sepanjang 2015 ada 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan 8.145 KK dan 6.283 unit usaha yang terdampak.¹⁵ Penggusuran paksa bahkan menggunakan kekuatan polisi dan kekuatan militer (tentara) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Penelitian menunjukkan bahwa 84% (97 kasus) penggusuran dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah dengan warga. Hanya 16% penggusuran yang melalui musyawarah dan 1 kasus yang membongkar dengan sukarela menunjukkan bahwa pembangunan di DKI Jakarta masih jauh dari partisipasi masyarakat dan masih meminggirkan orang yang lemah dan miskin. Penggusuran yang dilakukan oleh Basuki-Djarot malah menggunakan dana dari pengembang reklamasi dalam bentuk kontribusi tambahan.¹⁷



e-poster Hati-Hati Penggusuran dari LBH Jakarta (LBH Jakarta/Ode)

Dalam program kerja maupun perkiraan apabila Basuki terpilih kembali, penggusuran paksa akan terus terjadi di mana-mana. Satu hal yang paling terlihat jelas adalah penggusuran perkampungan nelayan di pesisir Teluk Jakarta yang menjadi salah satu program aksi Basuki-Djarot.¹⁸ Ada juga rencana penggusuran yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta di mana ada 325 (tiga ratus dua puluh lima) titik yang akan “ditertibkan:oleh Pemprov DKI

¹⁵ Alldo Fellix January, et. al., *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2016), hal. ii.

¹⁶ Lihat ketentuan tentang pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

¹⁷ *Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi*, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/11/231770080/podomoro-klaim-biaya-penggusuran-kalijodo-barter-reklamasi>>, diakses 3 April 2017.

¹⁸ Lihat Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat, hal. 13.

Jakarta.¹⁹ Basuki-Djarot juga tetap menyatakan bahwa penggusuran akan terus dilaksanakan. Salah satu alasan penggusuran yang paling sering dilontarkan adalah untuk mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh rakyat kecil. Namun ketika yang melanggar adalah pengembang besar pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan yang sama.

Reklamasi Teluk Jakarta yang berpotensi besar merusak lingkungan dan menimbulkan bencana juga dibangun dengan rencana serupa. Sebanyak 17 ribu nelayan akan tergusur dan Pemprov DKI Jakarta menjawabnya dengan rumah susun.²⁰



Penganiayaan terhadap Alldo Fellix Januarydy, Pengacara Publik LBH Jakarta (TEMPO/Subekti)

Selain meminggirkan warga Jakarta, penggusuran juga memakan korban Alldo Fellix Januarydy, Pengacara Publik LBH Jakarta yang dipukuli oleh polisi ketika memantau penggusuran di Bukit Duri.²¹

¹⁹ *Jelang Lebaran LBH Jakarta Peringatkan Warga Siaga Penggusuran Paksa*, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/jelang-lebaran-lbh-jakarta-peringatkan-warga-siaga-penggusuran-paksa/>>, diakses 6 Januari 2017.

²⁰ *Hasil Pertemuan Luhut-Ahok: Reklamasi Lanjut, 12 Ribu Nelayan akan Dapat Rusun*, <<https://news.detik.com/berita/3297286/hasil-pertemuan-luhut-ahok-reklamasi-lanjut-12-ribu-nelayan-akan-dapat-rusun>>, diakses 6 Januari 2017.

²¹ *Penggusuran Bukit Duri Rusuh, Pengacara LBH Dipukuli*, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/12/064735192/penggusuran-bukit-duri-rusuh-pengacara-lbh-dipukuli>>, diakses 6 Januari 2017.

Tabel 1. Daftar perusahaan di kawasan

No.	Nama	Alamat	Perusahaan	Estimasi 2017
1	Kedoya (Kedoya)	Jl. Raya Kedoya (Kedoya)	Kedoya Segitiga	1991
			Buka Gedung (Buka)	1991
			Indosat	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
2	Pasar Kedoya	Jl. Raya Kedoya (Kedoya)	Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
3	Kedoya (Kedoya)	Jl. Raya Kedoya (Kedoya)	Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
4	Kedoya (Kedoya)	Jl. Raya Kedoya (Kedoya)	Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
5	Kedoya (Kedoya)	Jl. Raya Kedoya (Kedoya)	Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991
			Garuda (Garuda)	1991

Gambaran singkat tentang alih fungsi ruang terbuka hijau di Jakarta

Basuki-Djarot juga selalu menyatakan bahwa penyebab banjir Jakarta adalah sungai yang menyempit. Solusinya, sungai di Jakarta harus “dinormalisasi” dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai. Alasan “normalisasi” ini yang kemudian menjadi pembenaran akan penggusuran seperti di Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Padahal, ada banyak cara untuk menyikapi warga yang tinggal di bantaran sungai. Pemukiman mereka bisa ditata sedemikian rupa seperti apa yang diusulkan oleh banyak arsitek kampung kota. Ciliwung Merdeka mengajukan konsep kampung susun untuk mencegah tercerabutnya warga dari kehidupan mereka sehari-hari.²²

Untuk solusi bagi warga yang tergusur yang kemudian dipindahkan ke rumah susun, LBH Jakarta menemukan bahwa warga mengalami peningkatan kebutuhan hidup sehari-hari untuk transportasi, biaya listrik, dan air, tidak mendapatkan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat secara merata, dan penggusuran dilakukan saat sedang terjadi kenaikan kelas bagi anak-anak yang masih bersekolah.²³ Akibatnya, terjadi tunggakan pembayaran sewa rusun yang menggunung. Penggusuran dan penggusuran paksa memicu dampak kemiskinan²⁴ dan semakin memperbesar ketimpangan ekonomi. BPS menunjukkan bahwa koefisien gini di Jakarta mencapai 0,41 (dari skala 0-1).²⁵

²² Konsep Kampung Susun sudah disetujui oleh Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta namun buyar ketika Basuki menggantikan Joko Widodo, Kampung Susun, <<https://ciliwungmerdeka.org/tag/kampung-susun/>>, diakses 2 April 2017.

²³ Survei Rumah Susun, <<http://www.rappler.com/indonesia/156193-survei-rumah-susun.>>, diakses 7 Januari 2017.

²⁴ *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016*, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>>, diakses 4 April 2017.

²⁵ *Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2011-2016*, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>>, diakses 4 April 2017.

Sebagai tambahan, dalam pertemuan dengan Sandyawan Sumardi dan warga Kampung Pulo di Balaikota DKI Jakarta, Basuki menyatakan bahwa ia akan membunuh sebagian orang untuk menyelamatkan orang banyak: "Kalau saya ditanya, 'Apa HAM anda?' Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, (maka dua ribu orang itu) saya bunuh di depan anda," kata Ahok dengan wajah serius".²⁶ Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi perlindungan Hak Asasi Manusia di masa reformasi seperti sekarang ini yang mana sudah ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan bahwa negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Untuk program pendidikan, Basuki-Djarot telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menyuguhkan program kerja yang konkrit. Pada 2016 total ada 2,7 triliun untuk pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).²⁷ Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama yang miskin di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak atas Kesehatan

Basuki-Djarot telah memiliki kebijakan yang baik dalam bidang kesehatan. Untuk pelayanan rumah sakit di kelas III pasangan ini menggratiskan biaya kepada seluruh pasien. Pasangan ini juga akan menggratiskan biaya vaksin kanker serviks (yang biaya vaksinnnya mahal) sbagi mereka yang berpenghasilan sesuai dengan atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk mencegah kanker serviks di kalangan perempuan. Program kerjanya cukup konkrit dengan cara jemput bola terhadap orang yang sakit,²⁸ tapi meninggalkan hal yang sangat penting dalam hal kesehatan, yaitu pencegahan atau pendekatan preventif.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Jujur dan Adil (*Fair Trial*)

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Namun, pemenuhan atas hak atas bantuan hukum ini bisa dikatakan ditelantarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Basuki-Djarot maupun Jokowi-Basuki karena Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Bantuan Hukum tak jelas nasibnya.²⁹ Apabila warga Jakarta yang miskin terlibat atau memiliki masalah hukum tidak ada mekanisme yang disediakan oleh pemerintah provinsi.³⁰ Tidak ada pula program bantuan hukum dalam program kerja Basuki-Djarot.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Basuki-Djarot dalam kerja-kerja sehari-hari sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur mengklaim menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang bersih. Basuki-Djarot dalam program kerjanya juga menjanjikan sistem e-budgeting, mendorong Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

²⁶ HAM Versi Ahok untuk Melindungi Rakyat Banyak, <<https://news.detik.com/berita/2998358/ham-versi-ahok-untuk-melindungi-rakyat-banyak>>, diakses 10 Januari 2017.

²⁷ Gubernur Ahok Kucurkan Rp 27 Triliun untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, <<http://news.detik.com/berita/d-3326767/gubernur-ahok-kucurkan-rp-27-triliun-untuk-kartu-jakarta-mahasiswa-unggul>>, diakses 8 Januari 2017.

²⁸ Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) ditargetkan menjamin ketersediaan 1 dokter bagi setiap 5.000 warga. Lihat Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat, hal. 11.

²⁹ Tentang bantuan hukum hanya disebutkan dalam beberapa pasal saja dan tidak jelas bagaimana mekanismenya. Lihat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

³⁰ Julius Ibrani, *et. al.*, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013).

bagi setiap pimpinan di Pemprov DKI Jakarta, termasuk dalam sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara transparan, obyektif, dan terukur. Basuki juga menentang DPRD DKI Jakarta yang memasukkan segala macam mata anggaran yang tidak masuk akal dalam APBD DKI Jakarta 2015.

Namun, hal ini menjadi pertanyaan ketika Basuki-Djarot dihadapkan dengan kasus reklamasi Teluk Jakarta. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo, salah satu staf khusus Basuki yaitu Sunny Tanuwidjaja menjadi perantara kepentingan pengembang reklamasi. Berkali-kali Sunny melakukan hubungan telepon baik dengan Aguan dan M. Sanusi yang membicarakan tentang kontribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Reklamasi. Terlihat jelas bagaimana pengembang dengan leluasa mengatur apa-apa saja yang harus dilaksanakan oleh Pemprov maupun DPRD untuk memuluskan proyek reklamasi.³¹

Namun, ketika hendak dijerat, ternyata Sunny tidak diakui oleh Basuki sebagai salah satu staf khususnya.³² Sunny juga tidak digaji oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan digaji oleh konglomerat Peter F. Sondakh. Hal inilah yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kesulitan untuk menjerat Sunny Tanuwidjaja, karena tidak dalam posisi sebagai penyelenggara negara.

Masih terkait dengan reklamasi, menurut Agus Rahardjo selaku Ketua KPK, kontribusi tambahan yang dipungut oleh Basuki kepada para pengembang seharusnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak dipergunakan begitu saja untuk membangun berbagai hal. Agus menyatakan mungkin pemungutan kontribusi tambahan tersebut tidak menguntungkan Basuki tapi menguntungkan orang lain.³³

Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi

Pada 28 Oktober 2015, Basuki mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.³⁴ Dalam Pergub tersebut diatur tentang tingkat kebisingan suara yang hanya boleh sebesar 60 (enam puluh) desibel, perwakilan yang dapat menemui pemerintah hanya 5 (lima) orang, dan lokasi aksi unjuk rasa yang dibatasi hanya di 3 (tiga) tempat. Ucapan agar para peserta aksi agar ditembak saja juga merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi.

³¹ *Segitiga Lobby Sunny*, Majalah TEMPO edisi 3-9 Oktober 2016.

³² Hal ini bertentangan dengan kejadian di mana warga Bukit Duri saat beraudiensi dengan Basuki mendapatkan undangan dari Sunny Tanuwidjaja. *Ciliwung Merdeka Menjawab Tuduhan Pak Ahok*, <<https://medium.com/forumkampungkota/ciliwung-merdeka-menjawab-tuduhan-pak-ahok-91032e96db6>>, diakses 11 Januari 2017. Sunny juga menjadi Direktur *Centre for Democracy and Transparency* (CDT), organisasi non-pemerintah yang didirikan Basuki. *Profil Sunny Tanuwidjaja*, <<http://www.rappler.com/indonesia/128815-profil-sunny-tanuwidjaja>>, diakses 12 Januari 2017.

³³ Agus juga menyatakan bahwa diskresi yang dijadikan alasan oleh Basuki untuk memungut kontribusi tambahan yang tidak masuk ke APBD tersebut tidak tepat karena aturan keuangan negara sudah jelas dan tidak boleh disimpangi begitu saja. Majalah TEMPO edisi 26 September-1 Oktober 2016.

³⁴ *Ahok Keluarkan Pergub Demo di Jakarta Hanya Bisa di Tiga Lokasi Ini*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/30/09290341/Ahok.Keluarkan.Pergub.Demo.di.Jakarta.Hanya.Bisa.di.Tiga.Lokasi.Ini>. Atas tekanan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan bahwa Pergub tersebut antidemokrasi, pro pemodal, dan mengekang rakyat. *Ahok Sudah Revisi Pergub Demo*, <http://news.liputan6.com/read/2364667/ahok-sudah-revisi-pergub-demo>



Konferensi Pers atas Pembubaran Festival Belok Kiri.Fest di Taman Ismail Marzuki (bbcindonesia.com)

Selain itu, sikap Basuki-Djarot yang melakukan pembiaran atas pembubaran Belok Kiri.Fest oleh ormas intoleran dan tidak dilanjutkannya pemberian izin oleh pihak Taman Ismail Marzuki (TIM). Padahal, TIM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketika ada aksi-aksi yang tidak konstitusional yang ingin menggantinya dari kursi Gubernur DKI Jakarta pasca menggantikan Joko Widodo yang menjadi presiden, Basuki sempat melontarkan pandangan bahwa setiap demonstran yang bertindak melawan hukum harus dibunuh di tempat meskipun banyak kamera televisi menyorot.³⁵ Terhadap hal ini tentu saja demonstrasi yang melakukan tindakan melawan hukum dalam unjuk rasa haruslah ditangkap, diproses hukum, dan diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pandangan dan Sikap terhadap Lingkungan Hidup

Dalam program kerjanya, Basuki-Djarot menyatakan akan membuat insinerator di tiga lokasi strategis dengan kapasitas total mencapai 3.000 ton per hari dengan teknologi yang sudah terbukti di negara maju.³⁶ Padahal, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya dan Makassar sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).³⁷ Insinerator memiliki potensi besar merusak kesehatan manusia melalui partikel-partikel logam berat dan bahan berbahaya lainnya yang berukuran nano.

Dalam kasus reklamasi, hal ini menunjukkan ketidakberpihakan Basuki-Djarot terhadap lingkungan hidup. Reklamasi akan menimbulkan banjir besar di Jakarta, menghancurkan ekosistem yang ada di

³⁵ *Ahok: Bunuh di Tempat Demontran yang Anarkis*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/10/14/ndf6yr-ahok-bunuh-di-tempat-demontran-yang-anarkis>>, diakses 8 Januari 2017, Juga: *Minta Demontran Ditembak Mati Ahok Tak Takut Melanggar HAM*, <<https://www.merdeka.com/peristiwa/minta-demonstran-ditembak-mati-ahok-tak-takut-melanggar-ham.html>>, diakses 9 Januari 2017.

³⁶ Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat, op. cit., hal. 20.

³⁷ Hal ini diputuskan MA pada 2 November 2016, *Perpres Pembakaran Sampah Dicabut MA*, Harian Kompas, 16 Januari 2017.

Teluk Jakarta, menambah biaya yang semakin besar untuk pengelolaan Teluk Jakarta, dan semakin memperbesar konsentrasi limbah di Teluk Jakarta.³⁸

Pandangan dan Sikap Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Basuki-Djarot sudah menyertakan penyandang disabilitas dalam Dewan Transportasi Kota Jakarta, merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja di Pemprov DKI Jakarta, dan menyediakan fasilitas umum untuk para penyandang disabilitas.³⁹ Hal tersebut diucapkan dalam debat yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta. Basuki-Djarot menjanjikan akan layanan bus khusus penyandang disabilitas di RPTRA tiap akhir pekan dan pelebaran trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas.⁴⁰

Meskipun Jakarta adalah Ibukota yang menjanjikan fasilitas umum terbaik di seluruh Indonesia, ternyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum dapat memberikan fasilitas umum yang dapat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.⁴¹ Layanan transportasi publik TransJakarta, layanan transportasi publik kereta api komuter, gedung instansi pemerintah, dan gedung instansi nonpemerintah yang menjadi objek observasi, seluruhnya berada pada kriteria “kurang aksesibel” ataupun “tidak aksesibel” berdasarkan pemenuhan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTM/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Kekeliruan Basuki-Djarot dalam program kerjanya tentang disabilitas adalah meletakkannya dalam bagian sosial karena menganggap bahwa hak-hak penyandang disabilitas adalah sikap kedermawanan (*charity*), bukan sikap karena hal tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah.⁴²

Pandangan dan Sikap terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Basuki-Djarot bertemu dengan perwakilan keluarga Suharto yaitu Probosutedjo. Padahal Suharto dan keluarga dan kroni-kroninya melakukan pelanggaran HAM berat dan korupsi luar biasa selama memerintah.⁴³

Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Air

Air bersih di Jakarta semakin hari semakin langka. Pasokan air yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu memenuhi kebutuhan 10 juta orang dan pelajar 3 juta orang dengan total 950 juta meter kubik air untuk mencukupi kebutuhan harian penduduk, industri dan komersial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu memenuhi 35 persen dari kebutuhan tersebut⁴⁴ melalui perusahaan

³⁸ Pakar ITB: Reklamasi Teluk Jakarta Akan Perparah Banjir, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/10/25/206814879/pakar-itb-reklamasi-teluk-jakarta-akan-perparah-banjir>>, diakses 20 Januari 2017.

³⁹ Lihat Debat Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diadakan oleh KPU DKI Jakarta, 10 Februari 2017.

⁴⁰ *Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat*, hal. 13 dan hal. 19.

⁴¹ Lihat Alldo Fellix Januardy, et. al., *Mereka yang Dihambat: Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2015).

⁴² *Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat*, hal. 19.

⁴³ *Ahok Diam-Diam Temui Probosutedjo*, <<http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki/20170316115327-516-200558/ahok-diam-diam-temui-probosutedjo/>>, diakses 1 April 2017.

⁴⁴ Nila Ardhanie, *Kebutuhan Air dan Amblesnya Tanah Jakarta*, Kompas, 24 Oktober 2016.

air yang sudah diprivatisasi dengan harga mahal.⁴⁵ Belum lagi tingkat kebocoran yang mencapai 45 persen.⁴⁶ Sisanya diambil oleh warga maupun korporasi dari air tanah yang kemudian menyebabkan Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) sekitar 15 persen per tahun. Penurunan muka tanah tersebut menjadi justifikasi reklamasi, NCICD dan proyek-proyek lainnya. Basuki-Djarot mendorong integrasi PAM dan PAL untuk memberikan layanan satu pintu atas kebutuhan air dan pengolahan limbah. Dalam sengketa dengan warga Jakarta yang menggugat privatisasi air, Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok-Djarot melakukan banding atas putusan privatisasi air Jakarta yang selama ini menjadi biang masalah mandeknya suplai air bersih di Jakarta.⁴⁷

Pandangan dan Sikap terhadap Hak atas Rasa Aman

Kriminalitas menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas rasa aman. Ketiadaan pekerjaan (hak ekosob) sebagai pemenuhan hak atas pekerjaan menimbulkan kejahatan perampokan yang akan berdampak pada hak atas rasa aman warga Jakarta (hak sipol). Demikian pula dengan kasus perkosaan maupun pelecehan seksual (hak sipol), bisa diakibatkan karena buruknya fasilitas umum (hak ekosob).⁴⁸ Basuki-Djarot menjanjikan penerangan jalan umum dan *closed circuit television* (CCTV) untuk mempermudah pengawasan dan mencegah maupun untuk mempermudah proses hukum terhadap tindak kejahatan.

⁴⁵ Warga DKI Jakarta menggugat privatisasi air melalui LBH Jakarta dengan gugatan Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁴⁶ *Ahok Kesal Pasokan Air Bersih di Jakarta Bocor 45 Persen*, <<https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-kesal-pasokan-air-bersih-di-jakarta-bocor-45-persen.html>>, diakses 4 April 2017.

⁴⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. di mana LBH Jakarta bertindak selaku kuasa hukum warga Jakarta yang ingin memperbaiki pengelolaan air di Jakarta.

⁴⁸ Lihat *Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat*, hal. 12 dan 16.



(bersamaaniessandi.com)

ANIES RASYID BASWEDAN-SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

DATA-DATA CALON GUBERNUR DKI JAKARTA

DATA PRIBADI

Nama lengkap : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 7 Mei 1969
NIK : 31740407055690004
Usia : 47 Tahun
Alamat : Jalan Lebak Bulus II Dalam No. 42, RT. 006/RW. 004, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
E-mail : baswedan@gmail.com
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Kawin
Agama : Islam
NPWP : 48.189.778.3-017.000
Hobi : Membaca
Motto hidup : -
Harta kekayaan : Rp. 7.307.042.605,- dan USD 8.893,-

PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
Doktoral (Ilmu Politik)	Northern Illinois University	2000-2005
Magister	University of Maryland	1996-1999
Sarjana	Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta	1989-1995
Sekolah Menengah Atas	SMAN 2 Yogyakarta	1985-1989
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 5 Yogyakarta	1982-1985
Sekolah Dasar	SD Laboratori Yogyakarta	1976-1982

PENGALAMAN PEKERJAAN

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Pendiri dan Ketua	Yayasan Indonesia Mengajar	2010-Sekarang
Menteri	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2014-2016
Deputi	Kantor Transisi Jokowi-Jusuf Kalla	2014
Juru Bicara	Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla	2014
Direktur Riset	The Indonesian Institute, Centre for Public Policy Analysis	November 2005-2009
Rektor	Universitas Paramadina	2007-2014
Penasihat Nasional	Partnership for Governance Reform	April 2006-Mei 2007
Peneliti Senior	Lembaga Survei Indonesia	2005-2007
Manajer Riset	IPC Electronics, Inc. Chicago	2004
Pusat Antar Universitas Studi	Universitas Gadjah Mada	1995

Ekonomi		
Asisten Peneliti	Office of Research, Evaluation, and Policy Studies	1999

PENGALAMAN ORGANISASI

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Penggagas	Gerakan "Turun Tangan"	2013-2014
Peserta	Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat	2013
Ketua	Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	2013
Dewan Penasihat	International Indonesian Scholars Association	-
Dewan Pembina	America-Indonesia Exchange Foundation	2012
Anggota Tim Seleksi KPU	Tim Khusus Presiden RI	2011
Anggota dan Juru Bicara	Tim Delapan	2009
Ketua Senat Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada	2009
Moderator	Debat Presiden Metro TV	2009
Ketua	Senat Mahasiswa Universitas Universitas Gadjah Mada	, 1992
Anggota	Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM	1989
Ketua	Organisasi Intra Sekolah se-Indonesia	1985

PUBLIKASI

JUDUL	INSTITUSI/FORUM	TAHUN
Penerobos Batas dan Kelumrahan	-	2013
Haji Agus Salim: Keteladanan yang Menggerakkan	-	2013
Ini Soal Tenun Kebangsaan. Titik!	-	2012
Bentangkan Optimisme Bangsa Trajectory	-	2008
Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections, and the Future of Democracy	-	2008
Merumuskan Kepentingan Indonesia	-	2006
Pemimpin Bervisi	-	2006
Surat dari Pemimpin	-	2005
Regional Autonomy and the Pattern of Democracy in Indonesia	-	2004

PENGHARGAAN

JUDUL	INSTITUSI	TAHUN
Dompot Dhuafa Award	Dompot Dhuafa	2013
Anugerah Hari Sastra Indonesia Tokoh Inspiratif	Balai Pustaka	2013
Anugerah Integritas Nasional	Komunitas Anti Suap dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	2013
The Golden Awards	Harian Merdeka	2013
20 Tokoh Yang Membawa Perubahan Dunia Untuk 20 Tahun Mendatang	Majalah Foresight	2010
The Association of Social and Economic Solidarity with Pacific Countries (PASIAD) Education Award	Pemerintah Turki	2010
Nakasone Yasuhiro Award	Nakasone Yasuhiro (Mantan Perdana Menteri Jepang)	2010
500 Muslim Yang Paling Berpengaruh (The 500 Most Influential Muslims Award)	The Royal Islamic Strategic Studies Center, Jordania	2010
Young Global Leaders	World Economic Forum	2009
Megawati Soekarnoputri Award	Taruna Merah Putih	2009
100 Intelektual Publik Dunia	Majalah Foreign Policy	2008
Gerald S. Maryanov Fellow	Universitas Northern Illinois,	2004
William P. Cole III Fellow	Universitas Maryland, College Park	1998

DATA KELUARGA

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri	Fery Farhati	Ibu Rumah Tangga
Anak	Mutiara Annisa Baswedan	Mahasiswa
Anak	Mikail Azizi Baswedan	Siswa SMA
Anak	Kaisar Hakam Baswedan	Siswa SD
Anak	Ismail Hakim Baswedan	Siswa SD

DATA-DATA CALON WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA

DATA PRIBADI

Nama lengkap : Sandiaga Salahuddin Uno
Tempat, tanggal lahir : Rumbai, 28 Juni 1969
NIK : 3174072806690006
Usia : 47 Tahun
Alamat : Jalan Galuh II No. 19, RT. 003/RW.001, Selong
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail : ssuno@saratoga.co.id
Jenis kelamin : Laki-laki
Status perkawinan : Kawin
Agama : Islam
NPWP : 07.182.127.6-093.000
Hobi : Olahraga, lari, basket, dan membaca
Motto hidup : Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas
Harta kekayaan : Rp. 3.856.763.292.656,- dan USD 10.347.381,-

PENDIDIKAN FORMAL

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN (MASUK-LULUS)
Doktoral	Program Studi Riset Manajemen Universitas Pelita Harapan	2015-Sekarang
Magister	Jurusan Bisnis Internasional dan Keuangan, The George Washington University, Washington D.C., Amerika Serikat	1991-1992
Sarjana	Jurusan Akuntansi, The Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat	1987-1990
Sekolah Menengah Atas	SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan	1984-1987
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 12, Jakarta Selatan	1981-1984
Sekolah Dasar	Persatuan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) Bulungan	1975-1981

PENGALAMAN PEKERJAAN

JENJANG	INSTITUSI	TAHUN
Presiden Direktur	PT. Saratoga Investama Sedaya, Tbk.	2014-2015
Direktur	PT. Adaro Energy, Tbk.	2007-2015
Komisaris	PT. Mitra Pinasthika Mustika, Tbk.	2010-2013
Komisaris	PT. Tower Bersama Infrastruktur, Tbk.	2009-2010
Pendiri	Recapital Group	1997
Executive Vice President	NTI Resources Ltd di Kanada	1995-1997

Manajer Investasi	Seapower Asia Investment Limited Singapura	1994-1995
Manajer Investasi	MP Holding Limited Group (mulai 1994)	1994-1995

PENGALAMAN ORGANISASI

JABATAN	INSTITUSI	TAHUN
Manajer Tim Nasional Bola Basket Putri	South East Asian (SEA) Games Manila	2005
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	2005-2008
Anggota Bidang Manajemen dan Bisnis	Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	2006-2009
Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2006-2010
Anggota Focus Group Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM), Koperasi dan Tenaga Kerja	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	2006-2009
Ketua Dewan Pembina	Yayasan Inovasi Teknologi (Inotek)	2008-Sekarang
Dewan Pengawas	Mien R. Uno Foundation (MRUF)	2008-Sekarang
Wakil Ketua Umum	KADIN Indonesia bidang Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK)	2008-2013
Anggota Focus Group UMKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja	Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	2009-2012
Anggota	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	2009-2014
Bendahara Umum	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	2010-2015
Anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK)	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2010-2014
Wakil Ketua Umum	Asosiasi Emiten Indonesia	2011-2014
Panel Ahli	Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)	2015-2018
Wakil Ketua Dewan Pembina	Partai Gerindra	2015-2020
Ketua Umum	Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)	2015-2020
Wakil Ketua Umum	KADIN Indonesia bidang UMKM, Koperasi, dan Industri Kreatif	2015-2020

PUBLIKASI

JUDUL	INSTITUSI/FORUM	TAHUN
-	-	-

PENGHARGAAN

JUDUL	INSTITUSI	TAHUN
Asia 21 Fellowship	The Asia 21 Network Asia Society	2008
Indonesian Entrepreneur of the Year	Enterprise Asia	2008

DATA KELUARGA

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri	Noor Asiah A. Aziz	Ibu Rumah Tangga
Anak	Anneesha Antheera Uno	Mahasiswa
Anak	Amyra Atheefa Uno	Pelajar
Anak	Sulaiman Salahuddin Uno	-

REKAM JEJAK ANIES RASYID BASWEDAN-SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Keterlibatan dalam suatu kasus hukum, kode etik atau pelanggaran HAM

Tidak ditemukan informasi mengenai hal ini.

Pandangan Terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas



Keterangan: Anies Baswedan di markas Front Pembela Islam (FPI) (tirto.co.id)

Serupa dengan apa yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono pada aksi 11 Februari 2017 di mana Anies-Sandiaga turut hadir di dalamnya, Anies Baswedan menunjukkan penurunan dalam penghargaannya terhadap keberagaman. Setelah kunjungannya ke markas besar Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan pada awal Januari kemarin,⁴⁹ Anies-Sandiaga kembali menunjukkan sikapnya yang mulai mendekat kepada ormas intoleran untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Hal ini bertolak belakang dengan sikapnya selama ini yang identik dengan kalangan Islam moderat.⁵⁰ Sebagaimana diketahui secara umum, FPI bersama ormas-ormas intoleran lainnya selalu menunjukkan tindakan yang anti keberagaman dan tidak segan menggunakan kekerasan. Saat kunjungan ke Petamburan, elektabilitas Anies-Sandiaga menempati urutan paling buncit dari ketiga pasang calon yang ada.⁵¹

⁴⁹ *Temui Habib Rizieq, Anies Baswedan Bantah Berbagai Fitnah* <<https://news.detik.com/berita/d-3385675/temui-habib-rizieq-anies-baswedan-bantah-berbagai-fitnah>>, diakses 12 Januari 2017.

⁵⁰ *Keakraban Anies Baswedan dan FPI Memicu Perdebatan*, <<https://beritagar.id/artikel/berita/keakraban-anies-baswedan-dan-fpi-memicu-perdebatan>>, diakses 15 Januari 2017.

⁵¹ *Elektabilitas Para Cagub DKI di 3 Survei Mutakhir*, <<https://news.detik.com/infografis/d-3361306/elektabilitas-para-cagub-dki-di-3-survei-mutakhir>>, diakses 15 Januari 2017. Lihat juga *Elektabilitas Tiga Calon Gubernur DKI Jakarta Naik*, <<https://pilkada.tempo.co/read/news/2016/12/14/348827908/elektabilitas-tiga-calon-gubernur-dki-jakarta-naik>>, diakses 15 Januari 2017. Dalam berita tersebut dituliskan: "Adapun Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno menempati posisi terbawah dengan 23,6% suara".

Dalam kaitannya dengan pandangan Anies Baswedan yang moderat sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut juga perlu dipertanyakan karena Anies Baswedan menunjukkan sikap yang tidak ingin dirinya diasosiasikan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan menyatakan bahwa LGBT sebagai “perilaku menyimpang”.⁵² Anies Baswedan juga tidak pernah berkomentar tentang kelompok minoritas yang mengalami persekusi seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok Kristen yang tidak bisa mendirikan gereja. Anies Baswedan bahkan langsung buru-buru melakukan klarifikasi ketika ada berita yang menyebut bahwa dirinya berpaham Syiah.⁵³

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan



Meme Kampanye Penghentian Reklamasi Anies-Sandiaga

Anies-Sandiaga secara tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta.⁵⁴ Hal tersebut haruslah diapresiasi karena hanya pasangan inilah yang secara terbuka sejak awal menolak reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini artinya pasangan ini menjaga mata pencarian para nelayan yang ada di sepanjang Teluk Jakarta dengan cara tidak menghilangkan sumber mereka mencari hasil laut. Namun dalam program Mata Najwa, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ini terlihat tidak memiliki konsep jelas dalam penolakannya

⁵² Maraknya LGBT, Ini Kata Menteri Anies Baswedan
<<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/25/o1gxly361-maraknya-lgbt-ini-kata-menteri-anies-baswedan>>, diakses 15 Januari 2017.

⁵³ Anies Baswedan: Saya Dituding Syiah Tapi Tak Ada Satupun yang Punya Bukti,
<<http://jabar.tribunnews.com/2016/12/29/anies-baswedan-saya-dituding-syiah-tapi-tak-ada-satu-pun-yang-punya-bukti>>, diakses 13 Januari 2017.

⁵⁴ Janji Tolak Reklamasi Dinilai Jadi Daya Tarik Anies-Sandi,
<<https://pilkada.tempo.co/read/news/2017/01/24/348839186/janji-tolak-reklamasi-dinilai-jadi-daya-tarik-anies-sandi>>, diakses 17 Januari 2017.

terhadap reklamasi Teluk Jakarta.⁵⁵ Lama kelamaan pandangannya juga mengendur menjadi reklamasi tidak seharusnya merugikan investor.⁵⁶

Untuk pedagang kaki lima, Anies-Sandiaga menjanjikan akan melakukan sertifikasi terhadap pedagang kaki lima di Jakarta.⁵⁷

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan

Anies-Sandiaga dalam berbagai wawancara berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Sebagai gantinya pasangan ini akan melakukan pemeremajaan pemukiman (berupa kampung deret dan kampung susun) dan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan.⁵⁸ Tetapi, hal ini juga dibantah sendiri oleh Anies Baswedan dalam satu-dua kesempatan bahwa keduanya jika terpilih akan tetap melakukan penggusuran dengan cara komunikasi yang baik⁵⁹ seperti yang sebelumnya terjadi pada masa Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta.⁶⁰ Dalam debat perdana yang diadakan oleh KPU, Anies-Sandiaga menyatakan akan melakukan *urban renewal*. Perlu dilihat lebih lanjut apakah program *urban renewal* tersebut akan berakhir dengan penggusuran warga atau tidak.⁶¹

Dalam program kerja dan saat debat, Anies-Sandiaga juga menjanjikan warga Jakarta rumah murah dengan uang muka 0 persen.⁶² Janji kampanye ini merupakan bagian dari program kerja bidang perumahan di tengah kota untuk menekan biaya transportasi.⁶³ Bagi para warga Jakarta, program ini menggembirakan di tengah luar biasa tingginya harga tanah di Jakarta yang menyebabkan orang dengan penghasilan menengah saja kesulitan untuk membeli rumah.⁶⁴ Namun, setelah melihat pemaparan dari Tim Sukses Anies-Sandiaga, ternyata rumah yang dijanjikan tidak sesuai dengan standar perumahan yang layak.⁶⁵

⁵⁵ Lihat episode Mata Najwa, Rabu 25 Januari 2017.

⁵⁶ *Saat Anies-Sandi Mulai Perhatikan Investor Proyek Reklamasi...*, <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/21/07541251/saat.anies-sandi.mulai.perhatikan.investor.proyek.reklamasi...>>, diakses 4 April 2017.

⁵⁷ *Anies Baswedan Ingin Pedagang Kaki Lima di Jakarta Bersertifikat*, <<https://news.detik.com/berita/d-3386112/anies-baswedan-ingin-pedagang-kaki-lima-di-jakarta-bersertifikat>>, diakses 4 April 2017.

⁵⁸ *Ini Solusi Penggusuran Tanpa Duka Anies-Sandi*, <<http://www.beritasatu.com/megapolitan/411364-ini-solusi-penggusuran-tanpa-duka-anies-sandi.html>>, diakses 3 April 2017.

⁵⁹ Dalam dokumen visi-misi dan program kerjanya, Anies-Sandiaga Anies-Sandi menjanjikan akan melakukan "*komunikasi yang lebih efektif dalam urusan pembebasan lahan*". Lihat *Pilar 2 tentang Pembangunan Kota*, dalam penanggulangan masalah banjir., *Anies-Sandi, Tuntas Ikhlas untuk Jakarta*, hal. 17.

⁶⁰ *Anies Baswedan: Tak ada Cagub janji tak lakukan penggusuran*, <<https://www.merdeka.com/politik/anies-baswedan-tak-ada-cagub-janji-tak-lakukan-penggusuran.html>>, diakses 3 April 2017.

⁶¹ *Anies Janjikan Urban Renewal untuk Atasi Penggusuran*, <<http://news.detik.com/berita/3395727/anies-janjikan-urban-renewal-untuk-atasi-penggusuran>>, diakses 19 Januari 2017.

⁶² *Ini Penjelasan Anies Tentang Konsep Rumah Tanpa DP*, <<https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp>>, diakses 3 April 2017.

⁶³ Lihat *Pilar 2 tentang Pembangunan Kota*, dalam penanggulangan masalah banjir., *Anies-Sandi, Tuntas Ikhlas untuk Jakarta*, hal. 21.

⁶⁴ *Lima Tahun Lagi, Generasi Milenial Terancam Tidak Bisa Membeli Rumah*, <<http://properti.kompas.com/read/2016/12/14/160706321/lima.tahun.lagi.generasi.milenial.terancam.tidak.bisa.membeli.rumah>>, diakses 3 April 2017.

⁶⁵ Ada 7 (tujuh) unsur dalam rumah yang layak sebagaimana dimaksud dalam Komentar Umum Nomor 4 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, yaitu: Jaminan perlindungan hukum; ketersediaan layanan, bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur; keterjangkauan; layak huni; aksesibilitas; lokasi; dan kelayakan biaya.

Reklamasi Teluk Jakarta sendiri jika benar-benar terwujud akan menggusur daerah pesisir untuk digunakan sebagai daerah penyangga reklamasi. Dengan sikapnya menolak reklamasi berarti Anies-Sandiaga telah mencegah penggusuran.⁶⁶

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan



Kartu Jakarta Pintar (kompas.com)

Dalam janji kampanyenya, Anies-Sandiaga berjanji akan meningkatkan kegunaan KJP menjadi KJP Plus.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Dalam janji kampanyenya, Anies-Sandiaga berjanji akan meningkatkan kegunaan KJS menjadi KJS Plus. Hal ini bagus, tapi tidak menyebutkan tentang pentingnya aspek preventif dalam hal kesehatan.

Sikap terhadap Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Semasa kampanye, Anies-Sandiaga berjanji akan menerapkan standar ISO 370001 untuk mencegah terjadinya korupsi, melakukan *e-budgeting*, dan *e-procurement* (pengadaan barang dan jasa), juga menghadiri acara-acara anti korupsi.⁶⁷

Namun, ternyata Sandiaga Uno selaku calon Wakil Gubernur selama ini tidak membayar pajak atas usaha-usaha yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan sendiri oleh dirinya dengan mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty. Nama Sandiaga Uno juga tercatat dalam dokumen Panama Papers.⁶⁸

⁶⁶ Penggusuran Pasar Ikan Diduga Terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, <<http://news.okezone.com/read/2016/04/11/338/1359536/penggusuran-pasar-ikan-diduga-terkait-proyek-reklamasi-teluk-jakarta>>, diakses 19 Januari 2017.

⁶⁷ Anies Sandi Andalkan ISO 37001 Sebagai Manajemen Antikorupsi, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58777c1937d22/anies-sandi-andalkan-iso-37001-sebagai-manajemen-antikorupsi>>, diakses 23 Januari 2017.

⁶⁸ Nama Sandiaga Uno keluar dalam pencarian nama di situs pencarian yang khusus dibuat untuk melihat nama-nama yang ada dalam Panama Papers. Ada 9 (sembilan) orang bernama Sandiaga Uno yang ada dalam Panama Papers. Lihat <<https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=sandiaga&e=&commit=Search>>, diakses 23 Januari 2017.

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Jujur dan Adil

Tidak ada program tentang hukum dan bantuan hukum dalam program kerja Anies-Sandiaga. Dalam satu kesempatan Anies Baswedan mengatakan bahwa ia bertemu dengan salah satu staf LBH Jakarta yang mengeluhkan bahwa LBH Jakarta mengalami pemangkasan subsidi karena sering mengkritik pemerintah terkait penggusuran. Anies kemudian menjanjikan penambahan subsidi terhadap LBH Jakarta.

LBH Jakarta kemudian menyatakan bahwa tidak ada stafnya yang bertemu Anies dan berkurangnya subsidi adalah hal yang wajar.⁶⁹

Pandangan Terhadap Hak atas Kebebasan Berekspresi

Ketika berkampanye di Sawah Besar pada Januari 2017, Anies menganggap bahwa spanduk yang bertuliskan "Amalkan Pancasila, Usir PKI dari NKRI" merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati.⁷⁰

Tetapi, dalam *tweet* Anies Baswedan pada 16 Mei 2012, akun resminya @aniesbaswedan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kebebasan berekspresi sebagai ekstrimis, yang melakukan provokasi dengan menggunakan pena. Anies Baswedan juga menyatakan bahwa memberikan forum kepada Irsyad Manji tidak menarik dan menuding banyak individu yang memanfaatkan kebebasan untuk menggandakan pandangan ekstrim.⁷¹

Pandangan dan sikap terhadap Lingkungan Hidup



Suasana kebakaran hutan di Provinsi Riau (riauone.com)

⁶⁹ Klarifikasi LBH Jakarta terkait Komunikasi dengan Anies Baswedan, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/klarifikasi-lbh-jakarta-terkait-komunikasi-dengan-anies-baswedan/>>, diakses 7 April 2017.

⁷⁰ Anies Nilai Spanduk Usir PKI bagian Dari Kebebasan Berpendapat, <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/16/22025571/anies.nilai.spanduk.usir.pki.bagian.dari.kebebasan.bberpendapa>>, diakses 1 Maret 2017.

⁷¹ Lihat *tweet* @aniesbaswedan pada 16 Mei 2012 dengan tagar #toleran.

Dari segi pelaksanaan, Sandiaga Uno selaku pengusaha menunjukkan langkah-langkah yang tidak pro terhadap lingkungan hidup. PT Langgam Inti Hibrido yang merupakan anak usaha PT Provident Agro Tbk milik Sandiaga Uno dibekukan izinnya oleh Menteri Lingkungan Hidup karena melakukan pembakaran hutan di Riau.⁷²

Selain itu tambang emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) Sandiaga Uno di Banyuwangi, Jawa Timur yang dimiliki bersama Boy Thohir dan Soeryadjaya menimbulkan kerusakan lingkungan berupa banjir lumpur di Pantai Pulau Merah yang merupakan pemukiman dan sumber penghidupan nelayan. PT. Bumi Suksesindo memiliki konsesi tambang seluas 1.942 hektar yang diperoleh berdasarkan penurunan status Gunung Tumpang Pitu yang jadinya merupakan hutan lindung.⁷³

Pandangan dan Sikap Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Anies Baswedan menyatakan akan terus meningkatkan aksesibilitas sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta pengarusutamaan terhadap penyandang disabilitas. Anies Baswedan juga menekankan penyebutan “berkebutuhan khusus” ketimbang “cacat” bagi para penyandang disabilitas.⁷⁴ Sedangkan semasa kampanye Anies-Sandiaga berjanji akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di DKI Jakarta. Program ini tidaklah konkrit⁷⁵ karena meletakkan dalam sekumpulan tugas sosial karena menganggap bahwa hak-hak penyandang disabilitas adalah sikap kedermawanan (*charity*), bukan sikap karena hal tersebut merupakan kewajiban (*obligation*) dari pemerintah yang menyamakan warganya.

Namun, ketika terdapat laporan dari Posko Pengaduan Ujian Nasional (UN) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang menemukan laporan di sejumlah provinsi tidak ada naskah soal UN huruf *braille* sehingga UN terkesan diskriminatif kepada kalangan tunanetra, Anies Baswedan menolak disalahkan dan menyatakan bahwa laporan tersebut terlalu sensasional dan terburu-buru menyatakan Kementerian Pendidikan diskriminatif.⁷⁶

Pandangan dan Sikap Terhadap Pelanggaran HAM Masa Lalu

Anies-Sandiaga diajukan oleh Prabowo Subianto, mantan jenderal menantu Suharto yang telah diduga keras melakukan pelanggaran HAM semasa Orde Baru. Dalam masa kampanye putaran kedua, Anies-Sandiaga menjumpai keluarga Suharto dan mengaku didukung keluarga Cendana.⁷⁷

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat*, <<https://www.jatam.org/tambang-emas-tumpang-pitu-hancurkan-masa-depan-rakyat/>>, diakses 1 Maret 2017

⁷⁴ *Mendikbud: Fasilitas Pendidikan Disabilitas Akan Terus Ditingkatkan*, <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/03/nyscmk359-mendikbud-fasilitas-pendidikan-disabilitas-terus-ditingkatkan>>, diakses 1 Maret 2017.

⁷⁵ Lihat Debat III Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diselenggarakan KPU DKI Jakarta, 10 Februari 2017, juga program kerja Anies-Sandi.

⁷⁶ *Mendikbud: UN Tidak Diskriminatif*, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/38980/mendikbud-un-tidak-diskriminatif/2016-04-07>, diakses 1 Maret 2017

⁷⁷ *Anies Baswedan: Kami Bersyukur, Titiek Soeharto Mendukung Kami*, <<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/24/anies-baswedan-kami-bersyukur-titiek-soeharto-mendukung-kami>>, diakses 1 April 2017.

Pandangan dan Sikap Terhadap Hak atas Air



Aetra, dahulu PT. Thames PAM Jaya (KONTAN/Muradi)

Anies-Sandiaga memiliki program terkait air bersih, Sandiaga Uno bahkan memiliki saham di AETRA.⁷⁸ Namun, dalam program kerja Anies-Sandiaga tentang air bersih, hanya berkutat di seputar koservasi air. Keduanya tidak menyebutkan tentang bagaimana AETRA dan Palyja seharusnya dikelola.

Pandangan dan Sikap Terhadap Hak atas Rasa Aman

Anies-Sandiaga tidak memiliki program untuk meningkatkan keamanan warga. Namun, secara lisan Sandiaga Uno menyampaikan akan menggunakan aplikasi *panic button* untuk perlindungan perempuan dan akan menggiatkan kembali program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).⁷⁹ Anies-Sandiaga malah melakukan diskusi tentang keamanan dengan para pensiunan tentara. Padahal soal keamanan dan ketertiban merupakan tugas dari kepolisian.⁸⁰

⁷⁸ *Punya Saham Aetra, Akankah Sandiaga Turunkan Tarif Air di Rusunawa?* <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/27/08173191/punya.saham.aetra.akankah.sandiaga.turunkan.tarif.air.di.rusunawa..>>, diakses 4 April 2017.

⁷⁹ *Anies-Sandiaga Rancang Sistem Keamanan Bagi Perempuan Jakarta,* <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/18/of8k5r361-aniessandiaga-rancang-sistem-keamanan-bagi-perempuan-jakarta>>, diakses 1 April 2017

⁸⁰ *Datangi Mantan Panglima TNI, Sandiaga Minta Pendapat soal Keamanan Jakarta,* <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/28/19464231/datangi.mantan.panglima.tni.sandiaga.minta.pendapat.soal.keamanan.jakarta>>, diakses 1 April 2017. Lihat juga *Djoko Suyanto Titip Stabilitas dan Keamanan Jakarta Pada Sandiaga Uno,* <<https://seruji.co.id/fokus/djoko-suyanto-titip-stabilitas-dan-keamanan-jakarta-pada-sandiaga-uno/>>, diakses 1 April 2017. dan *Pesan Sutiyoso kepada Anies-Sandiaga dan warga Jakarta,* <<http://www.antaraneews.com/berita/616286/pesan-sutiyoso-kepada-anies-sandiaga-dan-warga-jakarta>>, diakses 1 April 2017.

F. TABEL PERBANDINGAN VISI-MISI DAN PROGRAM KERJA

1. Visi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, dan manusiawi, dan fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional.	Jakarta kota maju dan beradab dengan seluruh warga merasakan keadilan dan kesejahteraan.

2. Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terbuka, dan melayani warga. 2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga, yaitu jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, hunian yang layak, bahan pangan yang terjangkau, transportasi publik yang ekonomis, dan lapangan pekerjaan serta usaha agar seluruh warga berkesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik sehingga Indeks Kebahagiaan kota Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di antara kota-kota di dunia. 3. Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh lahir dan batin, kompeten, dan berdaya saing global dengan Indeks Pembangunan Manusia yang setara dengan kota-kota maju di dunia. 4. Menata kota sesuai perubahan zaman untuk mendukung kemajuan ekonomi, keberlangsungan lingkungan, dan kehidupan sosial budaya warga. 5. Membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur kelas dunia dengan warga yang berketuhanan, berbudaya, bergotong royong, berwawasan, toleran, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun manusia Jakarta menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, penggerak birokrasi yang efektif, menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga bahan pokok, membangun sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta menyelesaikan masalah-masalah sosial. 2. Membangun lingkungan kota Jakarta secara BERKELANJUTAN dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial. 3. Membangun KESEJAHTERAAN dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan masalah mobilitas warga kota.

partisipatif, dan inovatif.	
-----------------------------	--

3. Program Kerja Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Untuk perbandingan program kerja dilakukan berdasarkan 12 (dua belas) kategorisasi masing-masing reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan banjir, tata ruang kota, transportasi, teknologi informasi, pariwisata dan kebudayaan, sosial, lingkungan hidup, dan keamanan. Untuk tiap Cagub-Cawagub diambil dari dokumen visi-misi dan program kerja yang sudah diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Visi-misi dan program kerja Cagub-Cawagub yang tidak terkategori dikumpulkan dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Secara umum, Agus-Sylvi memiliki program kerja yang paling sedikit jika dibandingkan dengan program dari kedua pasangan lainnya. Selain itu, pasangan ini memiliki program kerja khusus bidang keamanan yang bukan merupakan kewenangan Gubernur dan program soal keamanan ini juga tidak dimiliki oleh calon lainnya. Agus-Sylvi memiliki 44 (empat puluh empat) program, pasangan Basuki-Djarot memiliki 127 (seratus dua puluh tujuh) program, dan Anies-Sandiaga memiliki 88 (delapan puluh delapan) program.

REFORMASI BIROKRASI

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none">1. Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Mengurangi persyaratan yang tidak krusial namun memberatkan,b. Menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan, danc. Meminimalisasi kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif melalui program jemput bola, seperti<ol style="list-style-type: none">1) izin keliling2) AJIB (antar jemput izin bermotor) dan3) izin online,d. Menggunakan aplikasi berbasis IT agar seluruh 500-an perizinan dan semua pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan secara online,	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan good governance dan mendorong pelibatan publik.2. Kepemimpinan yang menggerakkan.3. Menggeser fokus dari mencari sumber pendapatan daerah ke pengelolaan belanja anggaran yang berkualitas dan berkeadilan.4. Membuat daftar prioritas penyerapan anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan5. Membuat sistem evaluasi penyerapan dan realisasi anggaran berdasarkan masalah dan dampak yang diinginkan.6. Memantau perbandingan antara belanja rutin vs. belanja modal; dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja rutin.7. Membangun budaya birokrasi yang efektif bagi staf pemerintah daerah dengan membangun keteladanan

<p>e. pembuatan akta kelahiran dan kematian dapat dilakukan langsung di rumah sakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menciptakan database perizinan terpadu dengan peta spasial yang terbuka bagi seluruh warga untuk menghindari sengketa izin dan penerbitan izin yang tumpang tindih. 3. Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membuka sistem rekrutmen bagi pegawai non-PNS. 4. Menyempurnakan penggunaan Indikator Kinerja (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan demosi, dan penentuan besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). 5. Rotasi, mutasi, dan demosi pegawai dilakukan dengan transparan melalui lelang terbuka, dan berbagai pertimbangannya tercatat dalam sistem kepegawaian (SIMPEG). 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dengan rasionalisasi jumlah pegawai melalui seleksi penerimaan yang lebih ketat, objektif dan terbuka, dan penegakan disiplin yang lebih terukur. 7. Mempercepat waktu dan kualitas respon birokrasi dalam sistem pengaduan masyarakat sebagai alat utama untuk pencegahan KKN dan mendorong perbaikan kinerja birokrasi dengan menjadikan respon terhadap pengaduan sebagai salah satu KPI. 8. Menjadikan birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta sebagai institusi pelayan masyarakat yang semakin profesional dan dipercaya. 9. Mewajibkan setiap pejabat Pemda untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun. 10. Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, PPATK, BPK, dan BPKP dalam rangka 	<p>pemimpin, bukan sekedar manager.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Menerapkan sistem “buka lebih siang & tutup lebih malam” bagi kantor pemerintah 9. Membangun sistem rekrutmen berdasarkan sistem merit. 10. Mendorong perumusan kebijakan berbasis temuan dan fakta lapangan (evidence-based). 11. Penyusunan metode pengukuran objektif dalam mengukur integritas pelayanan masyarakat di kantor kelurahan (semacam Indeks/Rating Integritas Pelayanan Kelurahan). 12. Kepemimpinan yang dapat diakses warga secara mudah. 13. Menginspirasi performa birokrasi dengan keteladanan dan pemberdayaan. 14. Membangun ruang keterlibatan mengenai kebijakan publik
---	---

<p>pemberantasan KKN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Meningkatkan transparansi anggaran melalui sistem IT yang mudah diakses publik, termasuk membuka detail kegiatan yang direncanakan, komponen yang akan dibeli, dan harga satuan barang dengan tujuan agar masyarakat dapat proaktif mengawasi penganggaran. 12. Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. 13. Menyempurnakan sistem perencanaan terpadu (mulai dari e-musrenbang sampai dengan e-budgeting) sehingga proses perencanaan semakin terkendali dan tepat sasaran. 14. Meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memudahkan pembayaran pajak secara online dan pemberian sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. 15. Menerapkan biaya pemanfaatan aset milik Pemda dengan harga yang layak dan kompetitif di pasaran dan memperbaiki sistem pencatatan aset agar seluruh aset terinventarisasi dan dikelola dengan baik. 	
--	--

PENDIDIKAN

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan amanat Undang-Undang dengan menjamin pelayanan pendidikan berkualitas gratis selama 12 tahun bagi siswa-siswi tidak mampu dengan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sehingga seluruh anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa memperoleh akses pendidikan. 2. Melalui program KJP angka putus sekolah akan dipertahankan di bawah 0.5% untuk SMA dan 0.1% untuk SMP dan SD; dan angka partisipasi murni wajib belajar 12 tahun akan ditingkatkan dari angka di bawah 60% hingga 90%. 3. Mewajibkan penggunaan KJP secara non-tunai agar tepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan program KJS dengan program KIS. 2. Memastikan bahwa program KJP yang sudah berlangsung lebih meningkat performanya. 3. Memberikan perhatian dan dukungan tidak hanya bagi pendidikan formal, namun juga informal, dengan mengembangkan dukungan Kartu Jakarta Pintar atau dukungan lainnya. 4. Penambahan jumlah guru dan dosen untuk mendukung kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan.

<p>sasaran, terkontrol, dan mudah dievaluasi secara berkala dengan pendataan yang semakin lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah milik Pemda melalui pelatihan guru dengan bekerja sama dengan instansi pendidikan unggul, dengan indikator nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru >75 dan peringkat PISA masuk dalam 30 besar kota dunia. 5. Memberikan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi siswa-siswi tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. 6. Melanjutkan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah milik Pemda sebanyak 785 sekolah, sehingga 100% sekolah negeri ditunjang fasilitas pendidikan yang layak sesuai standar nasional dan berbasis IT. 7. Pembentukan SMKN mandiri yang dikerjasamakan dengan dunia usaha dan institusi lain untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat langsung berkarya di dunia kerja dan berkompetisi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). 8. Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas. 9. Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatkan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit. 	
--	--

KESEHATAN

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kesehatan bagi 100% warga dengan mekanisme BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3 dan mendorong keanggotaan BPJS warga melalui lurah dan Dinas Kesehatan, melalui kerja sama lurah dengan BPJS dan PTSP untuk memastikan seluruh perusahaan mendaftarkan pegawainya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan program KJP dengan program KIP. 2. Memastikan bahwa program KJS yang sudah berlangsung lebih meningkat performanya. 3. Penambahan jumlah tenaga kerja medis untuk mendukung kebutuhan bidang kesehatan.

<p>memiliki BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU), dan dengan pemberian BPJS PBI kepada bayi yang baru lahir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) yang menjamin ketersediaan 1 dokter bagi setiap 5.000 warga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan program preventif dan promotif kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien terminal melalui pengobatan paliatif dengan mekanisme dokter keluarga. 3. Meningkatkan kategori 44 Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK) dan 5 RSUK menjadi RSUD kelas C. 4. Membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumber Waras dengan pengobatan khusus penyakit kanker, jantung, otak dengan tambahan sebanyak 2.000 tempat tidur, meningkatkan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional (akreditasi JCI) sejumlah minimal tiga RSUD, pembentukan pelayanan spesialis di setiap RSUD dengan mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan yang sudah ada, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian RS Swasta. 5. Menambah fasilitas intensive care NICU dan PICU minimal sejumlah tiga kali lipat dari jumlah yang ada. 6. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan perbaikan waktu tunggu rawat jalan menjadi kurang dari 60 menit. 7. Membuat syarat kebersihan dan sertifikasi BPOM yang dievaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan serta menjadi bagian pengurusan izin usaha bagi pemilik usaha kuliner maupun pedagang kaki lima. 8. Ketersediaan ambulans gratis bagi warga dengan penambahan armada 100 ambulans dengan target waktu tunggu 15 menit. 9. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja kesehatan dengan membuka sistem rekrutmen terbuka sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, serta menjalankan sistem sertifikasi yang setaraf dengan kota-kota maju di dunia. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Membantu menjaga kesehatan masyarakat dengan memperkuat program-program preventif (misal, “dokter masyarakat,” penyediaan fasilitas publik untuk berolah raga, akses pada makanan sehat)..
---	---

<p>10. Melanjutkan program budi daya ikan / peternakan dengan sistem bagi hasil 80% bagi warga dan 20% bagi Pemda dengan penyediaan fasilitas oleh Pemda untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Setelah banyak pelaku usaha berhasil, 20% akan dialokasikan untuk koperasi yang dibentuk.</p> <p>11. Membangun pasar perkulakan di Pasar Induk Kramat Jati untuk sembako murah dengan keanggotaan khusus bagi lapisan warga yang membutuhkan, seperti pemegang KJP dan warga bergaji UMP.</p> <p>12. Melakukan program pemberdayaan warga rusun melalui pelatihan dan job fair agar warga rusun dapat berkontribusi secara produktif kepada perekonomian daerah.</p>	
---	--

EKONOMI

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<p>Menjadikan Pemda sebagai salah satu aktor ekonomi utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran BUMD dalam mendukung ekonomi daerah dan mempercepat program pembangunan prioritas di bidang ketahanan pangan, penyediaan hunian layak, infrastruktur, dan transportasi. 2. Menjamin ketersediaan 9 bahan pokok di lokasi dan dengan harga yang terjangkau bagi warga dengan mendorong peranan BUMD memotong rantai distribusi yang panjang, salah satunya melalui pelaksanaan Operasi Pasar oleh BUMD di lokasi padat penduduk secara rutin. 3. Memperbaiki kesehatan finansial dan meningkatkan performa BUMD melalui pemilihan manajemen yang profesional, peningkatan corporate governance, dan pengawasan BUMD berbasis IT agar BUMD memperkuat pendapatan anggaran daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kemitraan dengan daerah-daerah lain yang berfungsi sebagai penyangga pasokan kebutuhan sembako di Jakarta, agar pasokan tetap terjaga sehingga harga dapat dikendalikan. Partnership dengan daerah lain ini hanya terbangun dengan hubungan kemitraan yang egaliter. 2. Menjaga kenaikan harga bahan pokok tidak melebihi kenaikan upah. 3. Memonitor penyerahan subsidi kepada produsen agar tepat sasaran 4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok 5. Meningkatkan efisiensi produksi dan menyederhanakan rantai distribusi untuk menjaga stok dan harga bahan pokok 6. Memetakan variasi kebutuhan dan preferensi konsumsi bahan pokok yang dimiliki masyarakat DKI Jakarta. 7. Memberikan kompensasi bagi warga miskin yang membutuhkan atau mendapat kesulitan akibat keadaan ekonomi.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Menciptakan sistem kerja sama yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak untuk memfasilitasi lebih banyak kerja sama antara Pemda dengan badan usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan Provinsi DKI Jakarta. 5. Menyediakan subsidi bahan pangan bagi pemegang KJP agar ada peningkatan gizi siswa-siswi Jakarta dengan target konsumsi daging sebesar 1,5 kg/bulan/anak. 6. Menciptakan ekosistem yang menunjang kolaborasi dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan di Jakarta dengan penyediaan co-working space dengan fasilitas pendukung di 5 wilayah kota administrasi dan penyederhanaan izin usaha kecil dan menengah. 7. Melanjutkan revitalisasi pasar tradisional dan pembangunan pasar basah modern seperti di kota-kota maju di dunia. 8. Memperkuat daya saing pedagang kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan pemberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha untuk pedagang-pedagang kecil di lokasi-lokasi yang strategis. 9. Melanjutkan program budi daya ikan / peternakan dengan sistem bagi hasil 80% bagi warga dan 20% bagi Pemda dengan penyediaan fasilitas oleh Pemda untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Setelah banyak pelaku usaha berhasil, 20% akan dialokasikan untuk koperasi yang dibentuk. 10. Membangun pasar perkulakan di Pasar Induk Kramat Jati untuk sembako murah dengan keanggotaan khusus bagi lapisan warga yang membutuhkan, seperti pemegang KJP dan warga bergaji UMP. 11. Melakukan program pemberdayaan warga rusun melalui pelatihan dan job fair agar warga rusun dapat berkontribusi secara produktif kepada perekonomian daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menggalakkan operasi pasar. 9. Memberikan pelatihan untuk urban farming dengan memanfaatkan area bersama di perumahan. 10. Melakukan negosiasi dan memberikan pinjaman kepada produsen. 11. Memberikan skema insentif dan disinsentif atas produk-produk tertentu. 12. Menelusuri dan menindak praktik-praktik yang membuat harga bahan pokok menjadi tidak menentu dan merugikan warga. 13. Membangun entrepreneurship center di kelurahan-kelurahan. 14. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pekerja yang terkena PHK. 15. Mengembangkan program magang untuk pekerja usia muda. 16. Memetakan lahan pekerjaan yang mengalami defisit/surplus jumlah pekerja. 17. Memberikan informasi lowongan kerja melalui aplikasi daring. 18. Menetapkan syarat pengadaan/pembuka lapangan kerja. 19. Penyederhanaan izin usaha agar dapat banyak menyerap pekerja (reformasi birokrasi). 20. Menyelenggarakan proyek masif & membuat skema insentif. 21. Memberi stimulus pada pengusaha muda agar dapat berkembang. 22. Memastikan semua pekerja mendapatkan jaminan kesehatan. 23. Program bantuan modal dan pengembangan usaha untuk UMKM sebagai penyerap tenaga kerja 24. Menjembatani antara lulusan pendidikan dan dunia kerja melalui mentorship dengan maestro atau tokoh-tokoh yang dapat mempersiapkan baik skill kerja maupun memberi inspirasi bagi lulusan.
--	--

PENANGGULANGAN BANJIR

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan penyediaan Ruang Terbuka Biru (RTB) sebesar 5% dengan menyelesaikan pembangunan 17 waduk dan 9 embung untuk menambah tampungan air: Waduk: Jagakarsa, Rawa Minyak, Pinang Ranti, Pondok Rangon 1, Kampung Rambutan, Cilangkap, Marunda, Lebak Bulus, Cilandak Marinir, Brigif, Kampung Rambutan 1, Cimanggis, Sunter Hulu, Pondok Rangon 2, Rawa Lindung, Kamal Longstorage, dan Pondok Rangon Embung: Cipadak, Lebak Bulus 3, Lapangan Merah, Kramat Jati, Haji Dogol, Sejuk Raya, Penganten Ali, Cendrawasih, Sunter Jaya. 2. Melanjutkan program pengembalian fungsi sungai dan kali yang sudah banyak ditempati hunian liar dan program relokasi warga ke rumah susun; mewajibkan lurah dan camat untuk memastikan tidak ada bangunan liar di atas seluruh saluran air di Jakarta, serta menyelesaikan normalisasi sungai melalui program JEDI. 3. Menambah kapasitas pompa air dua kali lipat dari kapasitas saat ini untuk mempercepat surutnya genangan dan tindakan preventif banjir, terutama di daerah-daerah yang rendah, dekat dengan aliran sungai, cekungan, dan kawasan Pantai Utara. 4. Melanjutkan pembangunan tanggul laut (NCICD A) di sepanjang pantai utara (Pantura) Jakarta untuk menyelesaikan banjir akibat air pasang. 5. Menghubungkan seluruh saluran air di Jakarta untuk mendistribusikan air hujan secara merata, serta membangun sistem pengawasan saluran air untuk mempercepat penanganan genangan dan banjir. 6. Otomatisasi pintu-pintu air dan pompa sesuai dengan ketinggian air, curah hujan, dan kondisi saluran air yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi tanggul dan pompa air 2. Memberikan BLT untuk korban banjir 3. Membangun sistem distribusi air dan lingkungan hijau. 4. Penerapan kebijakan <i>zero run-off</i> (nol Limpahan) di bagian hilir, yang intinya adalah semua air dimaksimalkan untuk diserap lagi kedalam tanah, bukan dialihkan ke saluran. 5. Perencanaan dan pembangunan sumur resapan dan/atau sarana pengolahan air untuk mengurangi genangan di permukaan dan meningkatkan supply air tanah (Konservasi Air). 6. Kerjasama dengan daerah sekitar DKI Jakarta untuk penghijauan kembali daerah resapan air di bagian hulu (hutan & gunung). 7. Pengolahan air limbah untuk bisa digunakan ulang atau diserap ke dalam tanah.

<p>terkait.</p> <p>7. Memperbanyak biopori dan sumur resapan melalui gerakan menabung air secara berkelanjutan.</p> <p>8. Pembangunan waduk di hulu sungai melalui pemberian hibah untuk waduk kepada Pemda sekitar Jakarta untuk mengatur debit air yang masuk Jakarta.</p>	
--	--

TATA RUANG KOTA

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> Mengendalikan pembangunan ke arah Selatan sebagai daerah resapan dan mendorong pembangunan ke arah Timur dan Barat, pembatasan intensitas pembangunan di lokasi-lokasi tertentu untuk memperlambat laju penurunan muka tanah, dan memunculkan sentra-sentra ekonomi dan kebudayaan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kota yang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang sesuai. Melaksanakan pembangunan rumah susun sebanyak 50.000 unit untuk menampung warga yang terkena relokasi dalam rangka program-program prioritas seperti normalisasi sungai, refungsi ruang terbuka hijau (RTH), dsb dan mendorong pemindahan warga ke bangunan vertikal di lokasi-lokasi padat penduduk melalui skema konsolidasi lahan untuk menyediakan ruang terbuka yang memadai. Membangun rumah susun yang terintegrasi dengan pasar tradisional, terminal, gelanggang olah raga (GOR), sekolah, dan waduk di berbagai lokasi di Jakarta yang diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, dan membangun apartemen sewa murah di pusat kota yang terjangkau bagi warga kelas menengah untuk mengurangi kemacetan antar kota. Percepatan penyediaan RTH sebesar 30% (20% publik dan 10% swasta) dari luas kota melalui program pembelian lahan 	<ol style="list-style-type: none"> Komunikasi yang lebih efektif dalam urusan pembebasan lahan Pembangunan infrastruktur akan terfokus pada penguraian titik-titik padat seperti jalan sempit, halte, stasiun, terminal, dan perempatan jalan yang macet. Pembangunan dan revitalisasi ruang publik fungsional seperti pasar, halte, stasiun, terminal, dan tempat wisata. Pembangunan dan revitalisasi ruang publik rekreasi seperti pantai publik, museum, dan taman kota Pembangunan tempat tinggal bertingkat di tengah kota dengan harga terjangkau untuk kelas menengah bawah, guna menekan biaya transportasi. Kajian peningkatan Koefisien Lantai Bangunan di kawasan antara jalan-jalan arteri menjadi 3 atau 4 (lebih dari 4 akan berakibat pada monopoli pengembang besar). Penataan kawasan hunian bertingkat untuk pekerja dengan akses jalan umum, air bersih terpipa dan pelayanan lainnya.

<p>oleh Pemda untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai RTH dan melanjutkan pembangunan 500 RPTRA untuk memenuhi jumlah minimal RPTRA sebanyak tiga per kelurahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengganti seluruh Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan penerangan pintar sebanyak 120.000 LED (smart lighting) berbasis IT untuk penghematan biaya listrik Pemda dan mempermudah pengawasan. 6. Melanjutkan reklamasi untuk mewujudkan Jakarta sebagai water front city sekaligus merevitalisasi daratan dan perairan Jakarta Utara melalui skema subsidi silang. 7. Mendorong pemasangan reklame LED, pelebaran trotoar sepanjang 2.700 kilometer yang menunjang kenyamanan pejalan kaki dan ramah bagi penyandang disabilitas dimulai dari kawasan Sudirman-Thamrin sebagai pusat kota dan ikon Jakarta. 8. Mendorong perbaikan trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang /Multifungsi (JPO/JPM) di seluruh Jakarta untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. 9. Membangun sistem ducting di berbagai wilayah Jakarta dengan menjadikan pembangunan ducting sebagai syarat izin pembangunan gedung agar pengaturan kabel utilitas dapat dilakukan dengan baik. 10. Membangun dan merevitalisasi kawasan permukiman padat penduduk sesuai kearifan lokal, terintegrasi dengan pembangunan sarana taman, tempat olahraga, dan pengelolaan sanitasi masyarakat. 11. Membangun dan menata perkampungan nelayan yang sehat dan bersih serta terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan dan pengembangan kawasan wisata. 	
--	--

TRANSPORTASI

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan pembangunan MRT Tahap 1 agar beroperasi di tahun 2019, memulai konstruksi Tahap 2 rute Bundaran HI - Ancol Timur sepanjang 13,5 kilometer di tahun 2019, dan konstruksi East-West Tahap 1 rute Ujung Menteng-Kembangan sepanjang 27 kilometer di tahun 2020. 2. Meningkatkan pelayanan transportasi bus dengan penambahan jumlah armada sebanyak 3.000 bus, penambahan rute TransJakarta serta penerapan fleet management berbasis IT untuk mencapai 1 juta penumpang/hari. 3. Mengintegrasikan seluruh operator bus dalam Transjakarta agar standar pengelolaan dan pelayanan bus di seluruh rute bisa bersaing dengan kota-kota maju di dunia serta bisa dievaluasi berkala dengan indikator yang terukur. 4. Peremajaan angkutan umum kecil (angkot) dengan bus sedang yang beroperasi di daerah pemukiman padat penduduk dan terintegrasi dengan Transjakarta. 5. Membangun jaringan 7 koridor LRT dalam kota sepanjang 110 kilometer, dimulai dengan rute Kelapa Gading-Velodrome sepanjang 6 kilometer untuk Asian Games 2018. 6. Menciptakan sistem respon cepat kemacetan berbasis IT dengan penempatan petugas di titik-titik rawan macet. 7. Mengimplementasikan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan utama guna mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. 8. Mendorong terimplementasinya sistem transportasi di Kawasan Jabodetabek melalui integrasi jalur lintas berbagai moda transportasi publik dengan sistem single ticketing. 9. Melanjutkan target realisasi pembangunan 45 flyover dan underpass di Jakarta dalam rangka percepatan pencapaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penertiban dengan saksi tegas terhadap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas 2. Menerapkan sistem berbagi kendaraan (<i>carpooling</i>) dengan memberikan kompensasi tunai bagi yang melakukan melalui aplikasi daring. 3. Memberikan jaminan keselamatan dan ketepatan waktu bagi pengguna angkutan umum 4. Menambah jumlah armada angkutan umum 5. Mengontrol kelayakan armada angkutan umum 6. Memberikan potongan harga untuk transportasi umum 7. Pembangunan infrastruktur yang memadai 8. Memberlakukan tarif parkir dan pajak tinggi bagi kendaraan bermotor 9. Percepatan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel yang efisien dan lebih terjangkau seperti MRT 10. Solusi atas kemacetan tidak hanya mengandalkan solusi tradisional, tetapi juga dengan melibatkan publik secara umum, misal: <ol style="list-style-type: none"> a. LSM dalam mengevaluasi dan memberi masukan b. Meng-educasi stakeholder pengguna mengenai pentingnya menggunakan moda transportasi alternatif yang dapat mengurangi kemacetan

road ratio sebesar 11% dan mengurangi perlintasan sebidang.

TEKNOLOGI INFORMASI

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Jakarta Smart City dengan penyempurnaan pusat kendali Jakarta / command center, penyediaan data berbasis teknologi untuk pengambilan kebijakan, dan pembuatan aplikasi-aplikasi untuk pelayanan publik dan kenyamanan masyarakat.2. Mendorong penggunaan kartu JakartaOne untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dan aktivitas komersial, dan memperbanyak transaksi keuangan non-tunai; di mana data-data yang diperoleh melalui penggunaannya menjadi informasi penting untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan kondisi masyarakat Jakarta dan pelaksanaannya semakin tepat sasaran.3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban kota dengan pengawasan terpadu melalui pemasangan 8.000 CCTV di titik-titik yang rawan persoalan kota (kriminalitas, kemacetan, genangan/banjir, tawuran, sampah, dll).4. Membangun sistem layanan telepon gawat darurat (emergency call center) 112 yang aksesibel 24/7, cepat tanggap, dan satu pintu melayani kebutuhan masyarakat untuk bantuan ambulans / paramedik, pemadam kebakaran dan kepolisian dan membuat aplikasi gawat darurat yang terintegrasi dengan layanan 112.5. Mendorong investasi pembangunan Fiber Optic (FO) agar infrastruktur teknologi Jakarta setara dengan kota-kota maju di Asia Tenggara.6. Menjamin ketersediaan akses WiFi gratis bagi warga di berbagai area publik.7. Menyediakan co-working space dengan fasilitas pendukung	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat sistem informasi antar produsen melalui aplikasi daring2. Menciptakan teknologi aplikasi daring yang berfungsi sebagai information clearing house (pembanding harga bahan pokok) dan e-commerce

bagi pengusaha bidang IT, seperti pelaku startup, untuk mendukung perkembangan iklim ekonomi digital.	
---	--

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Jakarta sebagai kota destinasi pariwisata utama di Indonesia dan Asia Tenggara, dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Jakarta. 2. Mengembangkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas budi daya ikan yang bekerja sama dengan 3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), dan mendorong pembangunan resort bertaraf internasional. 4. Menjamin ketersediaan moda transportasi publik yang terjangkau ke Kep. Seribu, salah satunya dengan penyediaan kapal yang terintegrasi dalam Transjakarta dengan metode pembayaran rupiah/mil. 5. Melanjutkan program revitalisasi Kota Tua dan fasilitas penunjang yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata dan pusat budaya dan sejarah Jakarta. 6. Merevitalisasi Kawasan Museum Bahari hingga Muara Angke dengan Restoran Apung untuk olahan makanan laut guna menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi wisata dengan mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat budaya dan pendidikan bahari. 7. Menjadikan Taman Impian Jaya Ancol sebagai taman hiburan bertaraf internasional dan terjangkau bagi warga yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan operator taman hiburan dari negara maju. 8. Menjadikan kantor walikota, lurah, dan camat sebagai tempat hiburan masyarakat secara reguler dengan pengelolaan PKL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong wisata pantai yang murah yang memberdayakan warga dan melestarikan lingkungan 2. Mendorong wisata religi dan situs bersejarah dengan inovasi yang menyenangkan 3. Membangun pusat-pusat budaya di setiap kota yang dapat dinikmati masyarakat 4. Melengkapi taman-taman kota dengan fasilitas untuk mengekspresikan budaya (misal amphiteater mini, dinding mural, dll) 5. Festival kebudayaan rutin dengan proses kompetisi dan showcase bertingkat dari kecamatan hingga provinsi

<p>yang tertata rapi dan pertunjukan seni di akhir pekan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Mendorong pembangunan pusat kebudayaan terpadu yang menampilkan berbagai macam budaya daerah-daerah di Indonesia. 10. Mengadakan kompetisi seni di RPTRA yang diperuntukkan bagi warga sekitar dengan tema lomba berkaitan dengan program Pemda. 11. Menyediakan rumah cagar budaya sebagai pusat kebudayaan bagi komunitas lokal untuk menjadi tempat berkumpulnya pegiat dan penikmat seni. 12. Menjadikan kawasan wisata Kampung Betawi di Setu Babakan menjadi destinasi wisata unggulan sebagai pusat kebudayaan Betawi. 13. Membangun dan merevitalisasi GOR untuk setiap cabang olahraga dengan retribusi yang kompetitif atau kerja sama dengan pihak ketiga agar pengelolaan GOR mandiri dan berkualitas. 14. Mendukung klub-klub olahraga dengan pemberian insentif kepada klub yang telah berhasil membina atlet memenangkan kejuaraan tingkat regional, nasional, dan internasional. 15. Menjadikan Lapangan Banteng sebagai pusat olahraga warga kota yang dapat beroperasi selama 24/7 lengkap dengan fasilitas olahraga penunjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 16. Mewujudkan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) sebagai kebun binatang kelas dunia yang dikelola secara transparan dan profesional serta terjangkau bagi seluruh warga. 17. Mendorong kerja sama komunitas seni lokal dengan promotor festival bertaraf internasional untuk menghasilkan kolaborasi pertunjukan seni tingkat dunia di Jakarta. 18. Mendorong pelaksanaan pasar malam di beberapa ruas jalan Jakarta yang bebas kendaraan, dimulai di kawasan Kemang dan Sabang, dengan PKL yang tertata rapi dan terjangkau bagi warga sehingga menjadi daya tarik turis lokal dan 	
--	--

<p>manca negara.</p> <p>19. Mengintegrasikan sekolah bidang pariwisata dengan industri pariwisata dan budaya untuk mewujudkan Jakarta sebagai destinasi wisata dan budaya.</p> <p>20. Melanjutkan keberlangsungan acara pagelaran seni tiap akhir pekan di Gedung Kesenian Jakarta.</p>	
---	--

SOSIAL

BASUKI TJAHAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan seluruh infrastruktur dan fasilitas publik, seperti halte, museum, toilet umum, dan trotoar agar ramah bagi penyandang difabel. 2. Mendorong pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) agar jumlahnya mencukupi kebutuhan seluruh siswa-siswi Jakarta yang berkebutuhan khusus. 3. Meningkatkan peran lurah untuk mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus agar bantuan Pemda dalam bidang transportasi dan pendidikan dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. 4. Menjamin ketersediaan panti sosial dengan fasilitas dan pelayanan yang semakin baik. 5. Menciptakan aplikasi berbasis IT untuk menghubungkan warga yang ingin membantu dengan anak-anak berkebutuhan khusus dalam bidang pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi. 6. Mengintegrasikan panti bina laras dengan RSUD Duren Sawit untuk menyediakan pelayanan pengobatan lebih berkualitas. 7. Melanjutkan pembangunan panti jompo terpadu berkonsep villa lanjut usia (lansia) di kawasan Ciangir, Tangerang, dengan fasilitas hotel berbintang. 8. Menciptakan sistem distribusi bantuan sosial darurat secara non-tunai agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM secara menyeluruh, termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan warga dengan disabilitas 2. Membangun kehangatan hubungan antarwarga untuk mengatasi masalah sosial 3. Menjadikan DKI Jakarta wilayah yang ramah terhadap disabilitas, yaitu memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Keramahan tersebut akan diwujudkan dalam aspek fasilitas umum dan pelayanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan bidang lainnya yang terkait dengan kehidupan disabilitas. 4. Pemberian tunjangan dan fasilitas bagi penduduk usia lanjut yang membutuhkan 5. Menghidupkan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan komunitas warga, seperti penyediaan fasilitas olahraga, perpustakaan, dll agar kegiatan lokal menjadi menyenangkan dan dapat mencegah dari potensi-potensi konflik 6. Memberikan dukungan pendanaan program bagi kegiatankegiatan RW

9. Mengoperasikan layanan bus khusus penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan warga di RPTRA tiap akhir pekan.	
--	--

LINGKUNGAN HIDUP

BASUKI TJAJAJA PURNAMA-DJAROT SYAIFUL HIDAYAT	ANIES BASWEDAN-SANDIAGA UNO
<p>Mewujudkan kota yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan terpadu dari pengangkutan sampah di rumah warga hingga pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 2. Membangun pengelolaan sampah (insinerator) di tiga lokasi strategis dengan kapasitas total mencapai 3.000 ton/hari dengan teknologi yang sudah terbukti di negara maju. 3. Memberikan insentif untuk pembangunan <i>green building</i> dengan sistem pengelolaan limbah secara mandiri. 4. Membangun fasilitas pendukung untuk menerapkan sistem <i>zero waste</i> di seluruh rusunawa milik Pemda. 5. Menerapkan regulasi pemberian insentif bagi masyarakat untuk melakukan daur ulang dan pengurangan volume sampah. 6. Bekerja sama dengan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). 7. Mendorong integrasi PAM dan PAL untuk memberikan layanan satu pintu atas kebutuhan air dan pengolahan limbah. 8. Mendorong pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta, dan rumah tangga berbasis komunal (sanitasi masyarakat) terutama di lingkungan padat penduduk. 9. Mengendalikan pengambilan air tanah guna menahan laju penurunan muka tanah. 10. Menegakkan aturan standar kelayakan kendaraan bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penanganan sampah mandiri di level rumah tangga (RT/RW) 2. Pemberian insentif untuk program daur ulang berbasis komunitas atau RT-RW 3. Sosialisasi penggunaan bahan organik baik untuk rumah tangga atau industri 4. Program insentif untuk industri kemasan dan produsen menggunakan bahan organik atau bahan yang dapat didaur ulang 5. Program insentif untuk produksi dan distribusi alat komposting inovatif dan industri daur ulang

<p>melalui uji KIR secara lebih ketat.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Melakukan penertiban pembakaran sampah liar secara rutin, terutama di daerah pemukiman warga.12. Mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG), salah satunya melalui standar penyediaan pipa gas di rumah susun dan penggunaan BBG untuk transportasi publik.13. Mempercepat perluasan pembangunan hutan dan taman kota di lokasi-lokasi strategis.14. Mendorong pelaksanaan dan memperluas area Car Free Day yang diadakan setiap akhir pekan.15. Mewujudkan kawasan larangan merokok di kawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda).	
--	--

G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN:

Setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kekurangan dalam hal rekam jejak dan kelebihan masing-masing dalam hal program kerja dan kelebihannya masing-masing, terutama yang menyangkut warga miskin Jakarta. Publik agar dapat memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, dapat memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia warganya dengan tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor seperti politik uang, sektarianisme yang didasarkan pada kebencian terhadap kelompok masyarakat lainnya.

REKOMENDASI:

Jakarta memang harus memberikan kepada warganya pendidikan gratis, kesehatan, lingkungan yang bersih, transportasi massal yang menjawab kebutuhan, dan lainnya, tapi juga hak atas kota. Hak atas kota berarti hak terhadap kota itu sebagai sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian. Dengan pengertian ini, maka hak atas kota itu tidak sekadar dimaknai bahwa warga berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, misalnya, tapi juga warga miskin tersebut memiliki hak untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut. Singkatnya, penduduk yang menetap di kota tersebut bukan hanya pelaku pasif dari sebuah perubahan, tapi aktif terlibat dalam proses perubahan itu.⁸¹ Dengan demikian, titik tolak dari hak atas kota, adalah partisipasi rakyat terhadap pembangunan kotanya.⁸² Oleh karena itu, warga Jakarta harus kritis dan mengawasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang terpilih nantinya agar melaksanakan masa pemerintahannya dengan menjunjung tinggi hukum, peraturan perundang-undangan, etika kenegaraan yang berlaku, dan tentu saja janji-janji kampanyenya.

⁸¹ Ana Sugranyes dan Charlotte Mathivet (ed.), *Cities for All Proposals and Experiences towards the Right to the City*, Habitat International Coalitions (HIC), 2010.

⁸² Partisipasi dan inklusif juga merupakan prinsip-prinsip umum HAM.

REFERENSI

BUKU

Robertson, David, *The Routledge Dictionary of Politics*, 3rd ed., New York: Routledge, 2004

Aribowo, et. al., *Mendemokratiskan Pemilu.*, Jakarta: Elsam, 1996

Januardy, Alldo Fellix, et. al. *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*, Jakarta: LBH Jakarta, 2016.

Sugranyes, Ana dan Charlotte Mathivet (ed.), *Cities for All Proposals and Experiences towards the Right to the City*, Habitat International Coalitions (HIC), 2010.

Januardy, Alldo Fellix, et. al., *Mereka yang Dihambat: Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2015.

Ibrani, Julius, et. al., *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013.

MAJALAH

Majalah TEMPO edisi 26 September-1 Oktober 2016.

Majalah TEMPO edisi 3-9 Oktober 2016.

SURAT KABAR

Harian Kompas, 24 Oktober 2016.

Harian Kompas, 16 Januari 2017.

LAIN-LAIN

Visi, Misi, & Program Kerja 2017-2022 Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saiful Hidayat.

Anies-Sandi: Tuntas Ikhlas untuk Jakarta.

ARTIKEL DARING

<<https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=sandiaga&e=&commit=Search>>, diakses 23 Januari 2017.

Ahok Diam-Diam Temui Probosutedjo, <<http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170316115327-516-200558/ahok-diam-diam-temui-probosutedjo/>>, diakses 1 April 2017.

Ahok Keluarkan Pergub Demo di Jakarta Hanya Bisa di Tiga Lokasi Ini, <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/30/09290341/Ahok.Keluarkan.Pergub.Demo.di.Jakarta.Hanya.Bisa.di.Tiga.Lokasi.Ini>.

Ahok Kesal Pasokan Air Bersih di Jakarta Bocor 45 Persen, <<https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-kesal-pasokan-air-bersih-di-jakarta-bocor-45-persen.html>>, diakses 4 April 2017.

Ahok Persilakan Jemaah Ahmadiyah Beribadah di Tebet, <<https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-persilakan-jemaah-ahmadiyah-beribadah-di-tebet.html>>, diakses 1 Januari 2017. Lihat juga Soal Jemaat

Ahmadiyah Disegel, Ahok: Kita Izinkan Ubah Peruntukan, <<http://news.detik.com/berita/2969868/soal-rumah-jemaat-ahmadiyah-disegel-ahok-kita-izinkan-ubah-peruntukkan>>, diakses 1 Januari 2017.

Ahok Sudah Revisi Pergub Demo, <http://news.liputan6.com/read/2364667/ahok-sudah-revisi-pergub-demo>

Ahok: Bunuh di Tempat Demonstran yang Anarkis, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/10/14/ndf6yr-ahok-bunuh-di-tempat-demonstran-yang-anarkis>>, diakses 8 Januari 2017

Ahok: Kelemahan Saya Sudah Cina, Kafir Pula, <<https://m.tempo.co/read/news/2014/12/14/231628483/ahok-kelemahan-saya-sudah-cina-kafir-pula>>, diakses 1 Januari 2017.

Anies Baswedan Ingin Pedagang Kaki Lima di Jakarta Bersertifikat, <<https://news.detik.com/berita/d-3386112/anies-baswedan-ingin-pedagang-kaki-lima-di-jakarta-bersertifikat>>, diakses 4 April 2017.

Anies Baswedan: Kami Bersyukur, Titiek Soeharto Mendukung Kami, <<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/24/anies-baswedan-kami-bersyukur-titiek-soeharto-mendukung-kami>>, diakses 1 April 2017.

Anies Baswedan: Saya Dituding Syiah Tapi Tak Ada Satupun yang Punya Bukti, <<http://jabar.tribunnews.com/2016/12/29/anies-baswedan-saya-dituding-syiah-tapi-tak-ada-satu-pun-yang-punya-bukti>>, diakses 13 Januari 2017.

Anies Baswedan: Tak ada Cagub janji tak lakukan pengurusan, <<https://www.merdeka.com/politik/anies-baswedan-tak-ada-cagub-janji-tak-lakukan-pengurusan.html>>, diakses 3 April 2017.

Anies Janjikan Urban Renewal untuk Atasi Pengurusan, <<http://news.detik.com/berita/3395727/anies-janjikan-urban-renewal-untuk-atasi-pengurusan>>, diakses 19 Januari 2017.

Anies Nilai Spanduk Usir PKI bagian Dari Kebebasan Berpendapat, <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/16/22025571/anies.nilai.spanduk.usir.pki.bagian.dari.kebebasan.bberpendapa>>, diakses 1 Maret 2017.

Anies Sandi Andalkan ISO 37001 Sebagai Manajemen Antikorupsi, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58777c1937d22/anies-sandi-andalkan-iso-37001-sebagai-manajemen-antikorupsi>>, diakses 23 Januari 2017.

Anies-Sandiaga Rancang Sistem Keamanan Bagi Perempuan Jakarta, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/18/of8k5r361-aniessandiaga-rancang-sistem-keamanan-bagi-perempuan-jakarta>>, diakses 1 April 2017

Buruh Jakarta Desak Ahok Tetapkan UMP 2017 Pakai Survei KHL, <<http://www.suara.com/bisnis/2016/10/10/205017/buruh-jakarta-desak-ahok-tetapkan-ump-2017-pakai-survey-khl>>., diakses 5 Januari 2017.

Ciliwung Merdeka Menjawab Tuduhan Pak Ahok, <<https://medium.com/forumkampungkota/ciliwung-merdeka-menjawab-tuduhan-pak-ahok-91032e96db6>>, diakses 11 Januari 2017.

Datangi Mantan Panglima TNI, Sandiaga Minta Pendapat soal Keamanan Jakarta, <<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/28/19464231/datangi.mantan.panglima.tni.sandiaga.minta.pendapat.soal.keamanan.jakarta>>, diakses 1 April 2017.

Djoko Suyanto Titip Stabilitas dan Keamanan Jakarta Pada Sandiaga Uno, <<https://seruji.co.id/fokus/djoko-suyanto-titip-stabilitas-dan-keamanan-jakarta-pada-sandiaga-uno/>>, diakses 1 April 2017.

Elektabilitas Para Cagub DKI di 3 Survei Mutakhir, <<https://news.detik.com/infografis/d-3361306/elektabilitas-para-cagub-dki-di-3-survei-mutakhir>>, diakses 15 Januari 2017. Lihat juga

Elektabilitas Tiga Calon Gubernur DKI Jakarta Naik, <<https://pilkada.tempo.co/read/news/2016/12/14/348827908/elektabilitas-tiga-calon-gubernur-dki-jakarta-naik>>, diakses 15 Januari 2017.

Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2011-2016, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>>, diakses 4 April 2017.

Gubernur Ahok Kucurkan Rp 27 Triliun untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, <<http://news.detik.com/berita/d-3326767/gubernur-ahok-kucurkan-rp-27-triliun-untuk-kartu-jakarta-mahasiswa-unggul>>, diakses 8 Januari 2017.

HAM Versi Ahok untuk Melindungi Rakyat Banyak, <<https://news.detik.com/berita/2998358/ham-versi-ahok-untuk-melindungi-rakyat-banyak>>, diakses 10 Januari 2017.

Hasil Pertemuan Luhut-Ahok: Reklamasi Lanjut, 12 Ribu Nelayan akan Dapat Rusun, <<https://news.detik.com/berita/3297286/hasil-pertemuan-luhut-ahok-reklamasi-lanjut-12-ribu-nelayan-akan-dapat-rusun>>, diakses 6 Januari 2017.

Ini Komentar Ahok Melihat Fenomena LGBT, <<http://news.liputan6.com/read/2421401/ini-komentar-ahok-melihat-fenomena-lgbt>>, diakses 1 Januari 2017.

Ini Penjelasan Anies Tentang Konsep Rumah Tanpa DP, <<https://news.detik.com/berita/d-3419664/ini-penjelasan-anies-tentang-konsep-rumah-tanpa-dp>>, diakses 3 April 2017.

Ini Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD DKI, <<http://news.detik.com/berita/2581416/ini-perolehan-kursi-partai-politik-di-dprd-dki>>, diakses 23 Januari 2017

Ini Solusi Penggusuran Tanpa Duka Anies-Sandi, <<http://www.beritasatu.com/megapolitan/411364-ini-solusi-penggusuran-tanpa-duka-anies-sandi.html>>, diakses 3 April 2017.

Janji Tolak Reklamasi Dinilai Jadi Daya Tarik Anies-Sandi, <<https://pilkada.tempo.co/read/news/2017/01/24/348839186/janji-tolak-reklamasi-dinilai-jadi-daya-tarik-anies-sandi>>, diakses 17 Januari 2017.

Jelang Lebaran LBH Jakarta Peringatkan Warga Siaga Penggusuran Paksa, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/jelang-lebaran-lbh-jakarta-peringatkan-warga-siaga-penggusuran-paksa/>>, diakses 6 Januari 2017.

Kampung Susun <<https://ciliwungmerdeka.org/tag/kampung-susun/>>, diakses 2 April 2017.

Kasus Bukit Duri, Hakim Imbau Pemda DKI Tak Main Kekuasaan, <<https://m.tempo.co/read/news/2016/09/06/083802046/kasus-bukit-duri-hakim-imbau-pemda-dki-tak-main-kekuasaan>>, diakses 14 Januari 2017.

Keakraban Anies Baswedan dan FPI Memicu Perdebatan, <<https://beritagar.id/artikel/berita/keakraban-anies-baswedan-dan-fpi-memicu-perdebatan>>, diakses 15 Januari 2017.

Klarifikasi LBH Jakarta terkait Komunikasi dengan Anies Baswedan, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/klarifikasi-lbh-jakarta-terkait-komunikasi-dengan-anies-baswedan/>>, diakses 7 April 2017.

Komunitas Waria Jakarta Dukung Ahok-Djarot, <<http://www.tigapilarnews.com/berita/2016/12/21/88144-komunitas-waria-jakarta-dukung-ahok-djarot>>, diakses 1 Januari 2017.

Lima Tahun Lagi, Generasi Milenial Terancam Tidak Bisa Membeli Rumah, <<http://properti.kompas.com/read/2016/12/14/160706321/lima.tahun.lagi.generasi.milenial.terancam.tidak.bisa.membeli.rumah>>, diakses 3 April 2017.

Maraknya LGBT, Ini Kata Menteri Anies Baswedan <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/25/o1gxly361-maraknya-lgbt-ini-kata-menteri-anies-baswedan>>, diakses 15 Januari 2017.

Mendikbud: Fasilitas Pendidikan Disabilitas Akan Terus Ditingkatkan, <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/03/nyscmk359-mendikbud-fasilitas-pendidikan-disabilitas-terus-ditingkatkan>>, diakses 1 Maret 2017.

Mendikbud: UN Tidak Diskriminatif, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/38980/mendikbud-un-tidak-diskriminatif/2016-04-07>, diakses 1 Maret 2017

Minta Demonstran Ditembak Mati Ahok Tak Takut Melanggar HAM, <https://www.merdeka.com/peristiwa/minta-demonstran-ditembak-mati-ahok-tak-takut-melanggar-ham.html>., diakses 9 Januari 2017.

Pakar ITB: Reklamasi Teluk Jakarta Akan Perparah Banjir, <https://m.tempo.co/read/news/2016/10/25/206814879/pakar-itb-reklamasi-teluk-jakarta-akan-perparah-banjir>., diakses 20 Januari 2017.

Pengusuran Bukit Duri Rusuh, Pengacara LBH Dipukuli, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/12/064735192/pengusuran-bukit-duri-rusuh-pengacara-lbh-dipukuli>., diakses 6 Januari 2017.

Pengusuran Pasar Ikan Diduga Terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, <http://news.okezone.com/read/2016/04/11/338/1359536/pengusuran-pasar-ikan-diduga-terkait-proyek-reklamasi-teluk-jakarta>., diakses 19 Januari 2017.

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013-2016, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>., diakses 4 April 2017.

Pesan Sutiyoso kepada Anies-Sandiaga dan Warga Jakarta, <http://www.antarane.ws.com/berita/616286/pesan-sutiyoso-kepada-anies-sandiaga-dan-warga-jakarta>., diakses 1 April 2017.

PKL Kota Tua Keluhkan Sepi Pembeli Usai Relokasi, <http://www.beritasatu.tv/news/pkl-kota-tua-keluhkan-sepi-pembeli-usai-relokasi/>., diakses 4 Januari 2017.

Podomoro Klaim Biaya Pengusuran Kalijodo Barter Reklamasi, <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/11/231770080/podomoro-klaim-biaya-pengusuran-kalijodo-barter-reklamasi>., diakses 3 April 2017.

Profil Sunny Tanuwidjaja, <http://www.rappler.com/indonesia/128815-profil-sunny-tanuwidjaja>., diakses 12 Januari 2017.

Punya Saham Aetra, Akankah Sandiaga Turunkan Tarif Air di Rusunawa? <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/27/08173191/punya.saham.aetra.akankah.sandiaga.turunkan.tarif.air.di.rusunawa..>.,diakses 4 April 2017.

Saat Anies-Sandi Mulai Perhatikan Investor Proyek Reklamasi..., <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/21/07541251/saat.anies-sandi.mulai.perhatikan.investor.proyek.reklamasi.>., diakses 4 April 2017.

Survei Rumah Susun, <http://www.rappler.com/indonesia/156193-survei-rumah-susun>., diakses 7 Januari 2017.

Tajuk Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, <<http://www.bantuanhukum.or.id/web/tajuk-advokasi-lembaga-bantuan-hukum-jakarta/>>, diakses 25 Januari 2017.

Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat, <<https://www.jatam.org/tambang-emas-tumpang-pitu-hancurkan-masa-depan-rakyat/>>, diakses 1 Maret 2017

Temui Habib Rizieq, Anies Baswedan Bantah Berbagai Fitnah <<https://news.detik.com/berita/d-3385675/temui-habib-rizieq-anies-baswedan-bantah-berbagai-fitnah>>, diakses 12 Januari 2017.

Track Record, <<https://www.merriam-webster.com/dictionary/track%20record>>, diakses 23 Januari 2017.



9786021756287